

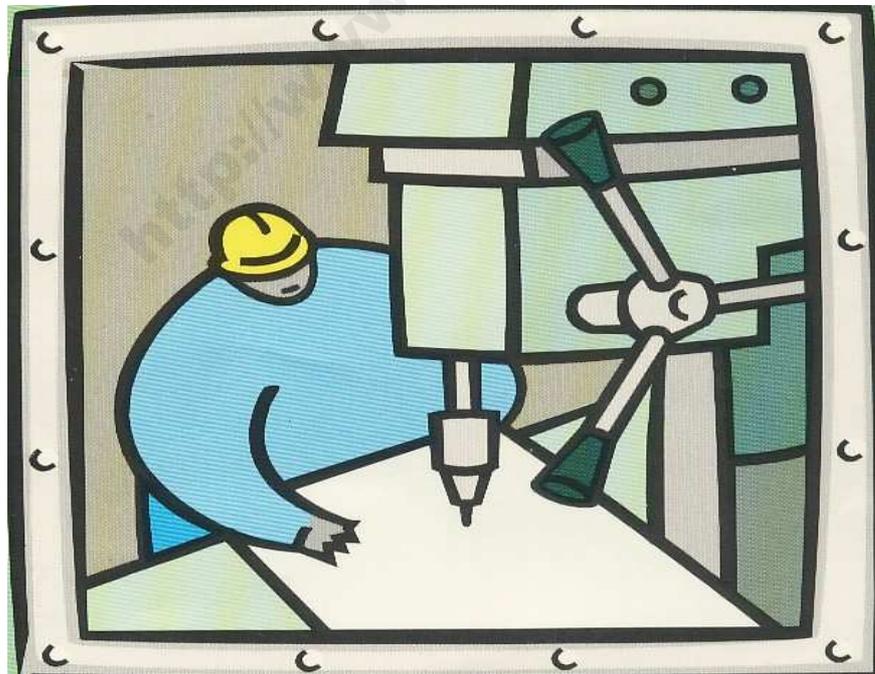


KATALOG BPS : 3405.

INDIKATOR

TINGKAT HIDUP PEKERJA

2006 - 2007



Badan Pusat Statistik

INDIKATOR TINGKAT HIDUP PEKERJA 2006 - 2007

ISBN. 979-724-303-6

Nomor Publikasi : 04120.0504

Katalog BPS : 3405

Ukuran Buku : 21,5 cm x 29 cm

Naskah :

Sub Direktorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit :

Sub Direktorat Statistik Ketenagakerjaan

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak oleh :

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Indikator Tingkat Hidup Pekerja Tahun 2006 – 2007 merupakan kelanjutan dari indikator yang sama pada tahun 2004 – 2006. Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat hidup pekerja/karyawan termasuk pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian. Selain itu, juga diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dimasa yang akan datang.

Data yang disajikan dalam Indikator Tingkat Hidup Pekerja 2006 – 2007 merupakan rangkuman hasil pengolahan beberapa data primer yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun data sekunder dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Secara garis besar informasi yang disajikan adalah mengenai keadaan pekerja/karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), rata-rata upah/gaji/pendapatan, Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Harga Konsumen (IHK), pasar tenaga kerja dan tenaga kerja asing.

Diharapkan Indikator Tingkat Hidup Pekerja dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan data ketenagakerjaan yang terus meningkat. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Kritik dan saran dari para pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan Indikator Tingkat Hidup Pekerja edisi selanjutnya.

Jakarta, Agustus 2008
Kepala Badan Pusat Statistik

DR. Rusman Heriawan
NIP: 340003999

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Penjelasan Umum	
I. Pendahuluan	xi
II. Sumber Data	xii
III. Konsep dan Definisi	xii
IV. Ulasan Singkat	xiv
4.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja	xiv
4.2. Pekerja (Buruh/Karyawan dan Pekerja Bebas) menurut Pendidikan	xv
4.3. Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan	xviii
4.4. Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan	xxi
4.5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	xxiv
4.6. Upah, KHL, UMP dan Inflasi	xxvi
4.7. Pasar Tenaga Kerja	xxviii

DAFTAR TABEL

Halaman

PEKERJA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1.1.	Persentase Pekerja/Karyawan menurut Propinsi Jenis Kelamin dan Daerah, Pebruari 2005	3
1.2.	Persentase Pekerja/Karyawan menurut Propinsi, Jenis Kelamin dan Daerah, Nopember 2005	4
1.3.	Persentase Pekerja/Karyawan menurut Propinsi, Jenis Kelamin dan Daerah, Pebruari 2006	5
1.4.	Persentase Pekerja menurut Golongan Umur, Jenis Kelamin dan Daerah, Pebruari 2005	6
1.5.	Persentase Pekerja menurut Golongan Umur, Jenis Kelamin dan Daerah, Nopember 2005.....	7
1.6.	Persentase Pekerja menurut Golongan Umur, Jenis Kelamin dan Daerah, Pebruari 2006.....	8
1.7.	Persentase Pekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Daerah, Pebruari 2005	9
1.8.	Persentase Pekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Daerah, Nopember 2005	10
1.9.	Persentase Pekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Daerah, Pebruari 2006	11
1.10.	Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin dan Daerah, Pebruari 2005	12
1.11.	Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin dan Daerah, Nopember 2005	13
1.12.	Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin dan Daerah, Pebruari 2006	14

UPAH/GAJI/PENDAPATAN

1.13.	Persentase Pekerja menurut Golongan Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan, Jenis Kelamin dan Daerah, Pebruari 2005	15
1.14.	Persentase Pekerja menurut Golongan Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan, Jenis Kelamin dan Daerah, Nopember 2005	16
1.15.	Persentase Pekerja menurut Golongan Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan, Jenis Kelamin dan Daerah, Pebruari 2006	17
1.16.	Pegawai Negeri Sipil menurut Lokasi Penyebaran (Propinsi), Tahun 2003 – 2005	18
1.17.	Persentase Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Kepangkatan, Tahun 2003 – 2005	19
1.18.	Persentase Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2003 – 2005	20

UPAH/GAJI/PENDAPATAN

2.1.	Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja Selama Sebulan menurut Propinsi dan Jenis Kelamin, Pebruari 2005 (Rupiah)	23
2.2.	Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja Selama Sebulan menurut Propinsi dan Jenis Kelamin, Nopember 2005 (Rupiah)	24
2.3.	Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja Selama Sebulan menurut Propinsi dan Jenis Kelamin, Pebruari 2006 (Rupiah)	25
2.4.	Perbandingan Nilai Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja dengan KHM dan UMP Selama Sebulan menurut Propinsi, Pebruari 2005 (Rupiah)	26
2.5.	Perbandingan Nilai Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja dengan KHM dan UMP Selama Sebulan menurut Propinsi, Nopember 2005 (Rupiah)	27
2.6.	Perbandingan Nilai Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja dengan KHM dan UMP Selama Sebulan menurut Propinsi, Pebruari 2006 (Rupiah)	28

2.7.	Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja Selama Sebulan menurut Golongan Umur, Nopember 2005 – 2006 (Rupiah)	29
2.8.	Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja Selama Sebulan menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2005 – 2006 (Rupiah) ..	30
2.9.	Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja Selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2005 – 2006 (Rupiah)	31

KHM, UMP DAN IHK

3.1.	Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Selama Sebulan menurut Propinsi, Tahun 2003 – 2005 (Rupiah)	35
3.2.	Upah Minimum Propinsi (UMP) Selama Sebulan menurut Propinsi, Tahun 2003 – 2005 (Rupiah)	36
3.3.	Persentase Pekerja menurut Karakteristik dan Keadaan Sekarang Dibandingkan Setahun yang lalu, Tahun 2005 – 2006	37
3.4.	Indeks Harga Konsumen (Umum) di 31 Ibukota Propinsi, Tahun 2003 - 2005	38
3.5.	Indeks Harga Konsumen Nasional menurut Karakteristik, Tahun 2003 - 2005	39
3.6.	Laju Inflasi di 31 Ibukota Propinsi, Tahun 2003 – 2005	40

TKI, PASAR TENAGA KERJA DAN TKA

4.1.	Persentase Tenaga Kerja Indonesia yang Dikirim dalam Rangka Antar Kerja Antar Negara (AKAN) menurut Negara Tujuan, Tahun 2003 – 2005	43
4.2.	Persentase Pendaftaran Pencari Kerja menurut Propinsi di Indonesia, Tahun 2003 -2005	44
4.3.	Persentase Permintaan Tenaga Kerja menurut Propinsi di Indonesia, Tahun 2003 -2005	45

4.4.	Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Propinsi di Indonesia Nopember 2005 - 2006	46
.....		

Halaman

4.5.	Persentase Tenaga Kerja Asing menurut Propinsi di Indonesia Tahun 2001 – 2003	47
4.6.	Persentase Tenaga Kerja Asing menurut Negara Asal, Tahun 2001 – 2003	48
4.7.	Persentase Tenaga Kerja Asing menurut Lapangan Usaha, Tahun 2001 – 2003	49
4.8.	Persentase Tenaga Kerja Asing menurut Jabatan Tahun 2001 – 2003 ...	50

http://www.bps.go.id

PENJELASAN UMUM

I. PENDAHULUAN

Publikasi ini disusun dengan maksud menyajikan informasi yang berkaitan dengan keadaan tingkat hidup pekerja. Pekerja di sini mengacu pada pekerja/buruh/karyawan dan pekerja bebas. Disadari bahwa untuk menyusun indikator tingkat hidup pekerja secara lengkap dan menyeluruh belum dapat dilakukan hingga saat ini, berkaitan dengan masih terbatasnya data yang tersedia. Keterbatasan lain berkaitan pula dengan adanya beberapa faktor kualitatif yang mempengaruhi tingkat hidup pekerja yang masih sulit diukur dan diterjemahkan ke dalam indikator yang bersifat kuantitatif. Oleh karenanya publikasi ini hanya menyajikan indikator yang masih sederhana baik dalam bentuk maupun cakupannya. Indikator yang disajikan dalam publikasi ini meliputi:

- Persentase pekerja di tiga sektor utama yaitu Agriculture (A), Manufacture (M), dan Services (S). Melalui indikator ketenagakerjaan ketiga sektor tersebut diharapkan

dapat mewakili gambaran perubahan keadaan perekonomian di Indonesia, dari sisi pekerja.

- Rata-rata upah/gaji/pendapatan pekerja. Dalam hal ini ingin dilihat besaran upah/gaji/pendapatan yang diterima dan perbedaan upah antar pekerja. Analisis ini secara tidak langsung dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pemerataan pendapatan pekerja.
- Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Upah Minimum Propinsi (UMP) dan *Inflasi*¹⁾. Melalui ketiga variabel tersebut ingin dilihat bagaimana hubungan keseimbangan kenaikan UMP terhadap laju inflasi dan kecukupan UMP dalam pemenuhan KHM.
- Pasar tenaga kerja. Melalui data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan kerja ingin dilihat kemampuan pasar kerja dalam mengimbangi penawaran kerja.

¹⁾ *Inflasi* adalah kenaikan tingkat harga rata-rata barang dan jasa secara umum. Kenaikan harga relatif dari satu jenis barang dan jasa belum tentu menunjukkan kenaikan inflasi.

II. SUMBER DATA

Data dalam publikasi ini berasal dari berbagai sumber di antaranya :

- Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas merupakan survei khusus tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan di Indonesia. Survei ini dilakukan secara teratur setiap bulan Agustus sejak tahun 1994 hingga tahun 2004 dengan unit pencacahan rumah tangga terpilih. Pada tahun 2005 Sakernas dilakukan pengumpulan data secara semesteran (Pebruari dan Agustus) sampai sekarang. Ketika pelaksanaan Sakernas 2005 Semester ke II bulan Agustus, secara bersamaan BPS melaksanakan survei penting lainnya. Akibatnya pelaksanaan Sakernas Semester II tertunda pelaksanaannya pada bulan Nopember 2005.
- Data dari publikasi Badan Pusat Statistik lainnya seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) dan angka inflasi.
- Data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Data yang diperoleh dari

kedua instansi Depnakertrans dan BKN antara lain mengenai KHM, UMP, AKAN/TKI, TKA dan data Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang merupakan hasil pelaporan.

III. KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi dari variabel yang digunakan dalam analisa ini bersumber dari SAKERNAS 2004, antara lain:

- a. Pekerja**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji/pendapatan baik berupa uang maupun barang. Dalam hal ini terdiri dari pekerja/buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian.
- b. Buruh/karyawan/pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga)

yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

c. Pekerja bebas (di pertanian dan non pertanian), adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian dan non pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

d. Upah/Gaji bersih, adalah penerimaan pekerja/buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan, iuran wajib, pajak penghasilan dan lain sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.

e. Pendapatan bersih sebulan yang lalu, adalah imbalan atau penghasilan yang diperoleh seseorang yang bekerja dengan status berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di non pertanian selama sebulan yang lalu. Untuk pekerja bebas di pertanian atau non pertanian, apabila pada saat pencacahan ia hanya bekerja selama seminggu yang lalu atau beberapa hari, maka isian pendapatan yang dicatat besarnya sesuai yang diterima dari pekerjaan seminggu atau beberapa hari tersebut.

IV. ULASAN SINGKAT

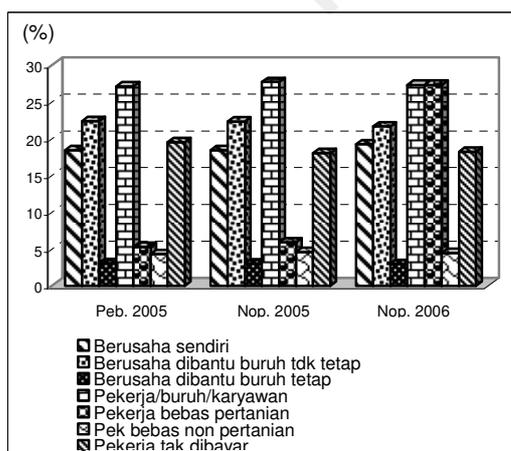
4.1. Penduduk Yang Bekerja dan Pekerja

Proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara biasanya akan disertai dengan perubahan dalam struktur perekonomiannya. Perubahan dalam struktur perekonomian salah satunya ditandai dengan perubahan dalam struktur ketenagakerjaan baik menurut lapangan usaha, status maupun jenis pekerjaan. Berdasarkan suatu kajian sejarah perekonomian oleh Kuznets, mengenai gambaran sentral dalam proses perubahan struktur ketenagakerjaan adalah terjadinya

pergeseran sumber daya dari sektor pertanian ke sektor industri (Chenery, Syrquin dan Robinson, 1986).

Pengamatan dalam struktur ketenagakerjaan akan ditemukan adanya suatu indikasi bahwa, majunya perekonomian salah satunya ditandai dengan makin banyaknya penduduk yang bekerja di sektor formal²⁾. Melalui Sakernas, sektor formal dapat didekati dari status pekerjaan dan jenis pekerjaannya. Dalam konsep BPS penduduk dengan status pekerjaan sebagai pekerja/buruh/karyawan dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja di sektor formal; sedangkan pekerja bebas pertanian dan pekerja bebas non pertanian dikelompokkan dalam sektor informal.

Gambar 1
Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama
Feb. 2005 – Nop. 2005 - Feb. 2006



Sumber : Diolah dari Sakernas 2005 - 2006

²⁾ Sektor Formal dan Informal menggunakan pendekatan penghitungan secara kualitatif yang dikuantitatifkan terhadap tabulasi silang antara status dan jenis pekerjaan.

Berdasarkan pendekatan tersebut diketahui bahwa pada keadaan Pebruari 2005 dan Pebruari 2006, persentase penduduk yang bekerja di sektor formal hampir sama, yaitu sekitar 36,15 persen. Justru pada Nopember 2005, persentase tersebut terjadi peningkatan dari kondisi sembilan bulan sebelumnya menjadi 36,81 persen dari 94,9 juta penduduk yang bekerja. Peningkatan persentase penduduk yang bekerja di sektor formal yang terjadi selama Pebruari – Nopember 2005, dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja dengan status sebagai pekerja/buruh/karyawan (0,6 persen), pekerja bebas di pertanian (0,7 persen) dan pekerja bebas di non pertanian (0,3 persen). Sebaliknya, terjadi penurunan jumlah pekerja tak dibayar sebesar 1,5 persen.

4.2. Pekerja Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya dengan investasi modal fisik. Berbagai penelitian yang dilaksanakan di sejumlah negara menunjukkan bahwa pendidikan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi.

Schultz (1963) menyimpulkan bahwa meningkatkan pendidikan tenaga kerja terbukti mampu menjelaskan bagian yang sangat besar dari pertumbuhan output di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang.

Pengamatan terhadap keadaan pendidikan pekerja, terlihat bahwa tingkat pendidikan pekerja di Indonesia pada umumnya masih sangat rendah. Pada keadaan Pebruari 2005, Nopember 2005 dan Pebruari 2006 pekerja yang hanya berpendidikan SLTA ke bawah masing-masing sebesar: 57,2 persen; 57,7 persen dan 57,7persen. Pada kenyataannya diketahui bahwa pada jenjang pendidikan rendah, peserta didik hanya baru diberikan bekal kemampuan dasar dan diasumsikan memiliki kemampuan serta ketrampilan pekerjaan yang masih rendah. Sebagai akibat dari pekerja dengan ketrampilan

yang belum cukup ini berkemungkinan besar hanya mampu melakukan pekerjaan yang banyak melibatkan kekuatan fisik. Namun apabila ditinjau dari segi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapan keahlian tertentu, pekerja berpendidikan rendah ini dianggap belum memiliki cukup keterampilan yang memadai untuk bekerja.

Sementara itu, pekerja dengan ketrampilan yang cukup memadai sebagai konsekwensi dari pekerja yang mendapatkan cukup pendidikan tinggi (di atas SLTA) berdasarkan Sakernas Pebruari 2005 sampai dengan Pebruari 2006 besarnya hanya sekitar 12,5 persen dari sekitar 34,8 juta pekerja yang ada di Indonesia.

Kondisi tingkat pendidikan pekerja yang demikian menunjukkan bahwa pasar

Tabel 1
Pekerja menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
2005 - 2006 (000)

Jenis Kelamin	Pebruari 2005			Nopember 2005			Pebruari 2006		
	Pendidikan			Pendidikan			Pendidikan		
	<SLTA	SLTA	>SLTA	<SLTA	SLTA	>SLTA	<SLTA	SLTA	>SLTA
Laki-laki	13 846,2 (57,4)	7 702,1 (32,0)	2 553,3 (10,6)	14 529,3 (58,2)	7 807,2 (31,2)	2 647,9 (10,6)	14 423,7 (58,1)	7 784,4 (31,3)	2 625,8 (10,6)
Perempuan	6 040,5 (56,6)	2 845,2 (26,6)	1 794,3 (16,8)	6 171,5 (56,6)	2 960,5 (27,2)	1 771,8 (16,2)	6 402,2 (56,8)	2 988,3 (26,5)	1 879,0 (16,7)
Laki-laki + Perempuan	19 886,8 (57,2)	10 547,4 (30,3)	4 347,6 (12,5)	20 700,8 (57,7)	10 767,7 (30,0)	4 419,7 (12,3)	20 826,0 (57,7)	10 772,7 (29,8)	4 504,8 (12,5)

Diolah dari hasil Sakernas Pebruari 2005, Nopember 2005 dan Pebruari 2006

tenaga kerja khususnya pekerja masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat kualitas yang masih rendah.

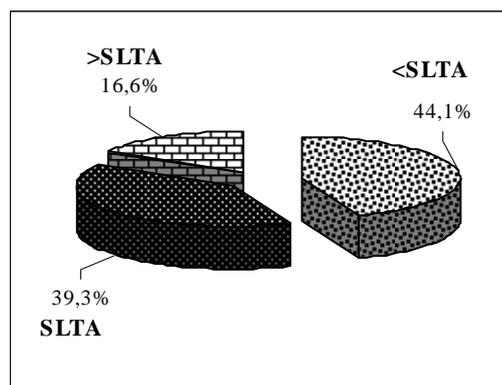
Kondisi setahun terakhir pada Pebruari 2006 dari hasil Sakernas menunjukkan sedikit perubahan, bahkan hampir sama dengan kondisi Pebruari 2005. Secara mutlak mengalami peningkatan, namun secara persentase hampir sama. Perubahan distribusi persentase terjadi pada Nopember 2005, semakin bertambahnya persentase pekerja berpendidikan menengah ke atas serta menurunnya persentase pekerja berpendidikan rendah. Kondisi ini diduga erat kaitannya dengan jumlah lowongan kerja dan kondisi pasar kerja yang tersedia menurut jenis kelamin, tingkat keterampilan, tingkat pendidikan tinggi dan kualitas calon karyawan yang di butuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Di tambah lagi faktor penerapan kemajuan tehnologi pada lapangan pekerjaan yang ada menuntut diiringi tersedianya tenaga kerja yang berkeahlian tertentu.

Pekerja menurut jenis kelamin dan pendidikan menunjukkan adanya kecenderungan persentase pekerja laki-laki dan perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi semakin

meningkat. Khusus pada pekerja dengan latar belakang pendidikan SLTA baik pekerja laki-laki maupun perempuan berkurang, masing-masing sebesar 0,7 persen dan 0,1 persen. Meninjau dari besarnya (secara persentase) penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi, maka perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tabel 1 mengungkapkan, persentase pekerja perempuan berpendidikan tinggi pada Pebruari 2006 sebesar 16,7 persen, sedangkan pekerja laki-laki sebesar 10,6 persen.

Berdasarkan data Sakernas pada periode Pebruari 2005 – Pebruari 2006,

Gambar 2
Distribusi Persentase Pekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Perkotaan, Pebruari 2006

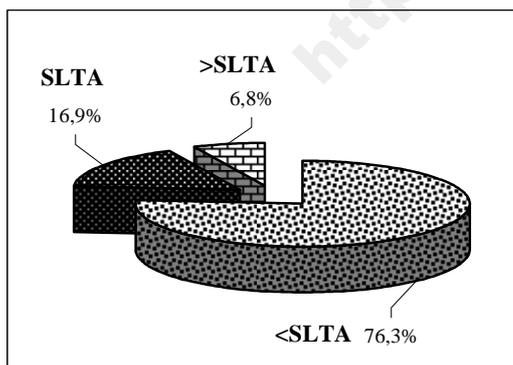


Sumber : Diolah dari Sakernas 2006

terjadi pengurangan persentase pekerja perempuan yang berpendidikan tinggi sekitar 0,1 persen, sedangkan pekerja

laki-laki tidak mengalami perubahan. Berikutnya pada kurun waktu yang sama, untuk tingkat pendidikan kurang dari SLTA tampak terjadi kecenderungan meningkatnya persentase pekerja laki-laki dan perempuan. Hal ini menggambarkan semakin rendahnya kualitas tingkat pendidikan pekerja yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Pola distribusi persentase pekerja perkotaan dan perdesaan menurut tingkat pendidikan kurang dari SLTA, tamat SLTA dan tamat perguruan tinggi (>SLTA) sangat berbeda nyata pada tahun 2005 – 2006.

Gambar 3
Distribusi Persentase Pekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Perdesaan, Pebruari 2006



Sumber : Diolah dari Sakernas 2006

Pekerja berpendidikan tinggi dan menengah di perkotaan memiliki persentase dua kali lipat lebih besar dari pada pekerja di perdesaan untuk tingkat

pendidikan yang sama. Sementara itu, untuk tingkat pendidikan kurang dari SLTA di perkotaan sebesar 44,1 persen. Sebaliknya untuk perdesaan, hampir 80 persen pekerja berpendidikan kurang dari SLTA dan hanya 6,8 persen berpendidikan tinggi dari 15 juta pekerja di perdesaan.

4.3. Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

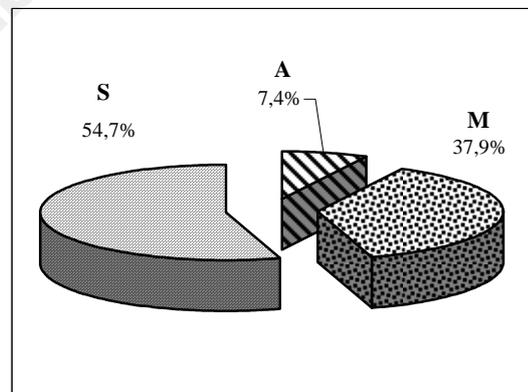
Dalam teori konvensional, kemajuan suatu perekonomian juga akan diikuti dengan perubahan dalam struktur lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang semula didominasi oleh sektor *Agriculture* (pertanian) akan beralih ke sektor *Manufacture* (pertambangan, industri, listrik dan bangunan) dan kemudian akan beralih ke sektor *Services* (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa kemasyarakatan). Namun ada pula yang berpendapat bahwa untuk negara berkembang, peralihannya bukan dari *Agriculture* (A) ke *Manufacture* (M) lalu ke *Services* (S) tetapi dari A ke S kemudian ke M. Hal ini dikarenakan menonjolnya sektor S di negara berkembang tidak sama dengan

menonjolnya sektor S di negara maju. Pekerja di sektor S yang meningkat jumlahnya di negara berkembang merupakan penampungan dari tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor M (Ananta dan Fontana, 1995).

Secara umum berdasarkan data Sakernas distribusi persentase pekerja di ketiga sektor A, M dan S selama kondisi Pebruari 2005, Nopember 2005 dan Pebruari 2006 memiliki pola penyebaran yang hampir sama. Berikutnya apabila diamati menurut sektor dan perbedaan wilayah menunjukkan adanya konsentrasi pekerja di sektor A di daerah perdesaan setiap tahun mencapai 42,2 persen. Sebaliknya di perkotaan justru terjadi penyerapan pekerja yang tinggi di sektor S rata-rata lebih besar dari 50 persen lebih. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dari sisi pekerja di sektor S, masih terpusat di daerah perkotaan sedangkan sektor A di perdesaan. Alasan lain tingginya jumlah pekerja di sektor A di perdesaan, kemungkinan pertama karena sektor A hanya memerlukan pekerja dengan tingkat keahlian rendah yang banyak tersedia di perdesaan. Kedua kemungkinan

adanya *shifted*³⁾ tenaga kerja dari pekerja yang terkena PHK dan atau tidak terserap oleh lowongan kerja yang tersedia di perkotaan pindah ke wilayah perdesaan setelah mereka tidak mampu lagi bertahan hidup di perkotaan. Di perdesaan, golongan pekerja berkeahlian/ketrampilan rendah terus tetap menjaga kelangsungan hidupnya dengan bekerja di sektor A yang memang banyak membutuhkan pekerja yang memiliki sedikit keahlian.

Gambar 4
Distribusi Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Perkotaan, Pebruari 2006



Sumber : Diolah dari Sakernas 2006

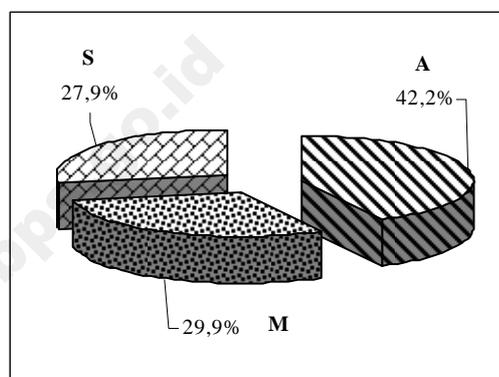
Selama Pebruari 2005, Nopember 2005 sampai dengan Pebruari 2006 kondisi pekerja di sektor S dan M mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dibandingkan dengan kondisi

³⁾ *Shifted* tenaga kerja adalah perubahan arah kecenderungan dari satu sektor ke sektor lainnya.

awal Pebruari 2005. Sebaliknya, kondisi pekerja pada sektor A dalam waktu yang sama sembilan bulan sejak Pebruari 2005 sampai dengan Nopember 2005 mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen (Nopember 2005) dan pada periode Nopember 2005 – Pebruari 2006 (hanya 3 bulan) meningkat sebesar 0,5 persen. Perubahan distribusi persentase pekerja di ketiga sektor menggambarkan kondisi banyaknya industri yang gulung tikar, karena diduga para investor di sektor industri lebih cenderung memilih berusaha di negara lain yang kondisi sosial, politik, keamanan dan hukum yang mendukung keuntungan usaha dan investasinya.

Pengamatan menurut jenis kelamin dan sektor menunjukkan bahwa pekerja laki-laki banyak terserap di sektor S sebesar 41,9 persen pada Pebruari 2005 dan mengalami penurunan sebesar 1,6 persen pada Pebruari 2006 (Tabel 2).

Gambar 5
Distribusi Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Perdesaan, Pebruari 2006



Sumber : Diolah dari Sakernas 2006

Tabel 2
Pekerja menurut Jenis Kelamin dan Sektor
2005 - 2006 (000)

Jenis Kelamin	Pebruari 2005			Nopember 2005			Pebruari 2006		
	A	M	S	A	M	S	A	M	S
Laki-laki	4 554,4 (18,9)	9 446,6 (39,2)	10 100,7 (41,9)	5 338,2 (21,4)	9 733,9 (39,0)	9 912,3 (39,7)	5 445,3 (21,9)	9 370,8 (37,7)	10 017,8 (40,3)
Perempuan	2 317,9 (21,7)	2 973,8 (27,8)	5 388,3 (50,5)	2 374,4 (21,8)	3 283,0 (30,1)	5 246,4 (48,1)	2 505,7 (22,2)	3 100,4 (27,5)	5 663,4 (50,3)
Laki-laki + Perempuan	6 872,3 (19,8)	12 420,4 (35,7)	15 489,0 (44,5)	7 712,6 (21,5)	13 017,0 (36,3)	15 158,6 (42,2)	7 951,0 (22,0)	12 471,2 (34,5)	15 681,3 (43,4)

Diolah dari hasil Sakernas Pebruari 2005, Nopember 2005 dan Pebruari 2006

Keterangan : A = Sektor Agriculture (Pertanian)

B = Sektor Manufacture (Pertambangan, Industri, Listrik, Gas, Air dan Bangunan)

C = Sektor Services (Perdagangan, Angkutan, Keuangan dan Jasa)

Demikian juga pekerja perempuan banyak terserap di sektor S, masing-masing sebesar 50,5 persen Pebruari 2005 dan 50,3 persen Pebruari 2006.

4.4. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan

Upah/gaji/pendapatan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai tingkat hidup pekerja. Upah yang rendah mencerminkan masih perlunya upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja.

Rata-rata jam kerja pada Pebruari 2005, Nopember 2005 dan Pebruari 2006 sama, namun upah/gaji/pendapatan pekerja pada Pebruari 2006 secara absolut mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Keadaan ini

menunjukkan adanya upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja.

Pebruari 2006, terjadi peningkatan kesenjangan upah pekerja menurut jenis kelamin, sebaliknya terjadi penurunan bila dilihat menurut perkotaan dan pedesaan.

Berdasarkan penelitian khusus oleh BPS terhadap data Sakernas mengungkapkan adanya kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki. Data Sakernas Pebruari 2005 – Pebruari 2006 menunjukkan adanya perubahan peningkatan yang nyata rata-rata upah perempuan dibandingkan dengan upah laki-laki. Ini berarti menunjukkan berkurangnya perbedaan pendapatan ditinjau dari rata-rata upah

Tabel 3
Rata-rata Jam Kerja Seminggu, Rata-rata Upah Sebulan dan Rasio Upah Pekerja menurut Daerah dan Jenis Kelamin, 2005 - 2006 (000)

Daerah/Jenis Kelamin	Pebruari 2005			Nopember 2005			Pebruari 2006		
	Jam Kerja	Upah (Rp)	Rasio	Jam Kerja	Upah (Rp)	Rasio	Jam Kerja	Upah (Rp)	Rasio
Perkotaan	45	845 603		45	856 088		45	906 360	
Pedesaan	41	542 842	64,20	40	554 371	64,76	40	558 867	61,66
Laki-laki	44	792 163		44	798 866		44	827 101	
Perempuan	41	555 726	70,15	40	574 682	71,94	41	612 131	74,01
TOTAL	43	719 563		43	730 753		43	759 999	

Dolah dari hasil Sakernas Pebruari 2005, Nopember 2005 dan Pebruari 2006

Rasio adalah perbandingan antara besarnya upah di pedesaan terhadap perkotaan (sebagai pembanding)

Untuk rasio upah menurut jenis kelamin sebagai pembanding adalah upah laki-laki

pekerja laki-laki dan perempuan. Semula pada Pebruari 2005 upah pekerja perempuan hanya 70,15 persen dari upah pekerja laki-laki, pada Nopember 2005 dan Pebruari 2006 masing-masing menjadi 71,94 persen dan 74,01 persen.

Perbedaan tingkat upah pekerja menurut jenis kelamin berdasarkan pendidikan, status pekerjaan, jenis pekerjaan, jumlah jam kerja dan lapangan pekerjaan berkemungkinan berkaitan dengan produktivitas, sehingga berimplikasi terhadap tingginya upah yang diterima.

Rata-rata jam kerja per minggu pekerja perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki yakni masing-masing sebesar 41 jam dan 45 jam pada Pebruari 2005 maupun pada Pebruari 2006. Hal ini kemungkinan adanya pengaruh “peran ganda perempuan”. Perempuan dituntut untuk membantu mencari nafkah bagi keluarganya di samping juga dituntut untuk melaksanakan tugas domestik yaitu mengurus segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Merujuk pada data Sakernas Pebruari 2005 – Pebruari 2006, terdapat perbedaan nyata rata-rata upah pekerja perkotaan dan perdesaan. Secara umum kenaikan upah di wilayah kota masing-

masing sebesar 5,9 persen dan 1,24 persen, selama periode (Nopember 2005 – Pebruari 2006) dan periode (Pebruari 2005 – Nopember 2005). Sedangkan untuk wilayah perdesaan sebesar 0,81 persen dan 2,12 persen. Pada Pebruari 2005 rata-rata upah pekerja perdesaan sekitar 64,2 persen dari rata-rata upah pekerja perkotaan. Rasio upah antara pekerja di wilayah perkotaan dibanding dengan perdesaan pada Pebruari 2006 mengalami penurunan yang besar, semula rasio sebesar 64,76 pada Nopember 2005 menjadi 61,66 pada Pebruari 2006 (Tabel 3). Kemungkinan alasan yang mendasari terciptanya perbedaan rata-rata upah antara pekerja perkotaan dibandingkan dengan pekerja perdesaan antara lain:

- Perkiraan produktivitas pekerja perkotaan lebih tinggi daripada pekerja perdesaan ditinjau melalui rata-rata jumlah jam kerja per minggu. Pada bulan Pebruari 2006, rata-rata jam kerja pekerja perkotaan dan perdesaan masing-masing 45 jam dan 40 jam.
- Kualitas pekerja perkotaan menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi daripada pekerja perdesaan. Keadaan bulan Pebruari 2006 dapat diungkapkan

bahwa persentase pekerja berpendidikan rendah di perkotaan sebesar 44,1 persen dari 21 juta pekerja di perkotaan, sedangkan di perdesaan sebesar 76,3 persen dari 15 juta pekerja perdesaan. Sebaliknya, persentase pekerja berpendidikan tinggi di perkotaan lebih tinggi dari pada di perdesaan yaitu masing-masing sebesar 16,6 persen dan 6,8 persen.

- Perputaran uang dan dinamika kegiatan perekonomian yang cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan, dianggap mempengaruhi kemudahan dan tingkat pendapatan atau laba yang lebih besar. Hal tersebut akan mempengaruhi perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kenaikan upahnya bagi yang berpotensi.

Kualitas pekerja berdasarkan pendidikan akan mempengaruhi besarnya upah yang diperolehnya. Rata-rata upah pekerja dengan tingkat pendidikan rendah (<SLTA) dan menengah (=SLTA) masing-masing sebesar sepertiga dan dua

pertiga kali lipat daripada pekerja berpendidikan tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa investasi pendidikan penting bagi kesejahteraan hidup pekerja.

Berkembang pesatnya sektor S di wilayah perkotaan yang sekaligus di perkirakan sebagai tempat penampungan pekerja yang tidak terserap di sektor M, justru menjanjikan tingkat upah/gaji/pendapatan yang lebih besar dibanding sektor lainnya. Pada rentang waktu Pebruari 2005 sampai dengan Pebruari 2006, rata-rata upah pekerja di sektor S sekitar dua setengah kali rata-rata upah pekerja di sektor A, sedangkan rata-rata upah pekerja sektor M dua kali lebih rata-rata upah pekerja sektor A. Lebih tingginya rata-rata upah pekerja sektor S dari sektor M kemungkinan:

Tabel 4
Rata-rata Jam Kerja Seninggu, Rata-rata Upah Sebulan dan Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2005

Daerah/Jenis Kelamin	Pebruari 2005			Nopember 2006	
	Jam Kerja	Upah (Rp)	Rasio	Jam Kerja	Upah (Rp)
A*)	36	355 080		36	369 396
M	46	738 600	208,01	46	753 511
S	44	866 013	243,89	44	895 066
<SLTA*)	43	479 057		43	493 588
SLTA	45	897 454	187,34	45	902 954

Tabel 5
UMP, Persentase Kenaikan UMP dan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hidup Minimum, 2003

Tahun	UMP (Rp)	Kenaikan UMP (%)	Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2003	414 715	14,33	5,06

pertama berkaitan dengan lebih besarnya biaya faktor produksi pada sektor M daripada sektor S. Kedua lebih banyaknya pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi terserap di sektor S diasumsikan memberikan kontribusi tingkat upah yang lebih tinggi.

4.5. Upah, KHM, UMP dan IHK

Dalam pembahasan masalah upah biasanya terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Bagi pekerja, kenaikan upah minimum akan memperbaiki daya beli pekerja yang akhirnya akan mendorong kegairahan bekerja dan peningkatan produktivitas kerja. Bagi pengusaha,

upah merupakan salah satu biaya faktor produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkat keuntungan yang dihasilkan bagi perusahaan. Ada suatu pendapat umum bahwa kenaikan upah baru dapat dilakukan apabila sektor riil telah tumbuh secara nyata melalui peningkatan produktivitas pekerja.

Adanya perbedaan kepentingan tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja, diarahkan agar penentuan besarnya mengacu kepada terpenuhinya Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) bagi pekerja. Hal ini sesuai

dengan standar internasional bahwa upah minimum yang ditetapkan harus mampu memenuhi sekurang-kurangnya KHM.

Berdasarkan data UMP (Upah Minimum Propinsi) pada tingkat Nasional, terjadinya peningkatan UMP tahun 2003 ke UMP tahun 2005 secara rata-rata masing-masing sebesar 10,8 persen tahun 2004 dan 10,5 persen 2005. Kenaikan UMP pada tingkat nasional bersamaan pula diikuti oleh kenaikan tingkat Inflasi yang tinggi (Tabel 5). Besarnya kenaikan inflasi yang menggambarkan kenaikan harga sejumlah kelompok barang-barang tertentu yang dianggap peka terhadap perubahan harga ini, masih lebih rendah dibandingkan kenaikan UMP pada tahun 2004. Sebaliknya pada tahun 2005 terjadi kenaikan inflasi secara drastis yang mencapai 17,1 persen. Pada tabel 5 kolom (5), selisih kenaikan antara UMP dan inflasi masing-masing sebesar 4,4 persen tahun 2004 dan minus 6,6 persen tahun 2005.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai makna 'cukup memadai' kenaikan UMP bagi pekerja di bandingkan kenaikan harga, maka dilakukan perbandingan UMP terhadap KHM. Data bersama dari BPS dan

Depnakertrans dari tahun 2003 sampai 2005 menunjukkan adanya kekurang berartinya kenaikan UMP bagi peningkatan kesejahteraan pekerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase perbandingan antara UMP terhadap KHM sebagai pembanding, masih di bawah seratus persen. Pada kolom 7 tabel 5 (UMP/KHM), menunjukkan perbandingan 86,68 persen (2003) yang berarti tingkat upah yang diterima oleh pekerja secara rata-rata nasional hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat minimum pekerja sebesar 86,68 persen. Angka ini juga dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan pekerja belum terpenuhi, meskipun kenaikan upah bagi pekerja telah dilakukan. Apa lagi bila ditinjau dari kenaikan inflasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan persentase UMP ini, mana bisa di implikasi sebagai indikator menurunnya tingkat kesejahteraan pekerja. Karena melambungnya angka inflasi menyebabkan kenaikan UMP menjadi tidak berarti lagi sebagai akibat nilai komponen pembentuk KHM menjadi tinggi. Selanjutnya kondisi dan kenaikan UMP, KHM dan Inflasi untuk tingkat propinsi dapat dilihat pada tabel-tabel lampiran 3.

Kenaikan UMP 2004 ke 2005 tidak berarti, jika diikuti dengan kenaikan inflasi yang tinggi, maka pekerja semakin tidak mampu memenuhi KHM nya pekerja.

4.6. Pasar Tenaga Kerja

Data pendaftaran pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan kerja diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengumpulan data pasar tenaga kerja oleh Depnakertrans yang berasal dari laporan penduduk pencari kerja dengan identifikasi mencari kartu kuning. Adanya persyaratan untuk menyertakan kartu kuning dalam melamar pekerjaan, umumnya berlaku hanya pada sektor formal. Sebaliknya, untuk sektor informal tidak pernah mensyaratkan tersedianya kartu kuning bagi pelamar untuk melamar pekerjaan yang tersedia. Mengingat rekapitulasi pelaporan penduduk pencari kerja tersebut dilakukan dengan mengacu pada banyaknya penduduk pencari kerja yang melapor ke Depnakertrans dalam upaya mendapatkan kartu kuning, sehingga kemungkinan besar tidak tercakupnya para pencari kerja yang enggan melaporkan diri. Keabsenan dan keengganan para pencari

kerja untuk melapor pada saat sebelum dan sesudah mendapatkan pekerjaan ini, akan menyebabkan penyimpangan (*bias*) terhadap keakuratan data pasar tenaga kerja yang sebenarnya.

Sementara itu, dari konsep Sakernas, banyaknya penduduk yang “mencari pekerjaan” merupakan jumlah penduduk usia kerja yang memiliki kriteria yang “pernah bekerja atau tidak pernah bekerja dan sedang mencari pekerjaan”. Di tambah lagi, data pencari kerja Sakernas dalam mencakup baik sektor informal maupun formal.

Merujuk pada konsep dan tata cara pengumpulan data pasar tenaga kerja baik dari Depnakertrans maupun BPS melalui Sakernas; maka perlu kehati-hatian dalam menggunakan, membandingkan dan mengartikan data yang digunakan. Mengingat masing-masing data pasar tenaga kerja tersebut memiliki kelebihan, kekurangan, makna dan fungsi yang berbeda; sebaiknya digunakan kedua sumber data tersebut sebagai sumber untuk menggambarkan keadaan pasar tenaga kerja nasional yang saling melengkapi.

Berikut ini disampaikan contoh penafsiran dan perbandingan data pasar tenaga kerja Sakernas dan Depnakertrans.

Dari hasil Sakernas Nopember 2005 diketahui tingginya penawaran tenaga kerja sebagai “kegiatan

Angka lowongan kerja hanya sekitar 24 persen dari banyaknya pencari kerja dan tidak semua lowongan kerja dapat terpenuhi .

mencari pekerjaan” berjumlah 11.104.693 orang, sedangkan dari Depnakertrans menunjukkan adanya jumlah yang jauh lebih rendah yaitu 382.706 orang. Kemungkinan perbedaaan besar angka lowongan kerja ini sangat bisa terjadi dan bisa dimaklumi, mengingat batasan-batasan dan tatacara pengumpulan data yang sangat berbeda. Terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah, sistim pelaporan data di Depnakertrans banyak mengalami dilema (banyak tidak masuk ke Pusat).

Menurunnya jumlah permintaan pekerja mencerminkan lesunya kegiatan perekonomian. Perubahan tren tingkat jumlah lowongan kerja searah dengan kecenderungan jumlah pencari kerja. Pada tahun 2004 tersedia 97.801 lowongan kerja dan bertambah menjadi hampir dua kali lipat yaitu 168.394 pada tahun 2005. Meskipun bertambahnya jumlah lowongan kerja, namun diperburuk

oleh kondisi tidak terpenuhinya semua lowongan kerja yang ada. Hal tersebut mengindikasikan adanya *mismatch* (ketidakcocokan) antara tingkat kualifikasi pencari kerja dengan persyaratan yang ditawarkan pada lowongan kerja tersebut. Dari segi penawaran, pencari kerja laki-laki lebih banyak sekitar 17,6 dibanding pencari kerja perempuan.

Tabel 6
Pasar Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin
2005

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Total
Pencari Kerja	206 839	175 867	382 706
Lowongan Kerja	87 854	80 540	168 394
Penempatan	76 061	65 216	141 277

Sumber : Depnakertrans

Demikian juga apabila diamati dari segi permintaan, maka lowongan kerja laki-laki sekitar tujuh ribu lebih besar dibandingkan dengan banyaknya lowongan kerja perempuan. Dengan demikian peluang mendapatkan pekerjaan bagi laki-laki nampaknya lebih besar daripada perempuan.

Tahun 2006, terjadi peningkatan kesenjangan upah pekerja menurut jenis kelamin, sebaliknya terjadi penurunan bila dilihat menurut perkotaan dan perdesaan.

<http://www.bps.go.id>

**TABEL 1.1 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT PROVINSI,
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
AGUSTUS 2006**

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalar	1,17	1,20	0,90	1,55	1,18
Sumatera Utara	5,18	4,89	5,26	4,86	5,09
Sumatera Barat	1,57	1,95	1,15	2,41	1,69
R i a u	2,22	1,40	1,54	2,54	1,96
J a m b i	0,84	0,76	0,62	1,08	0,82
Sumatera Selatan	2,08	2,35	2,19	2,14	2,17
Bengkulu	0,43	0,36	0,48	0,32	0,41
Lampung	2,51	1,80	1,41	3,47	2,29
Bangka Belitung	0,62	0,35	0,49	0,59	0,54
Kepulauan Riau	0,82	0,98	1,41	0,16	0,87
DKI Jakarta	6,26	8,41	12,09	0,00	6,92
Jawa Barat	20,75	17,74	19,88	19,74	19,82
Jawa Tengah	15,48	16,86	13,92	18,57	15,91
D.I. Yogyakarta	1,83	2,21	2,49	1,23	1,95
Jawa Timur	18,92	19,67	16,75	22,37	19,15
Banten	4,78	4,43	5,49	3,57	4,67
B a l i	1,94	2,55	2,42	1,74	2,13
Nusa Tenggara Barat	1,35	2,02	1,48	1,65	1,56
Nusa Tenggara Timur	0,55	0,66	0,53	0,66	0,58
Kalimantan Barat	1,41	1,16	1,12	1,61	1,33
Kalimantan Tengah	0,67	0,64	0,41	1,00	0,66
Kalimantan Selatan	1,16	1,12	1,04	1,29	1,15
Kalimantan Timur	1,63	0,98	1,59	1,21	1,43
Sulawesi Utara	0,87	0,67	0,70	0,94	0,80
Sulawesi Tengah	0,48	0,69	0,47	0,65	0,55
Sulawesi Selatan	2,45	2,53	2,52	2,41	2,47
Sulawesi Tenggara	0,47	0,32	0,30	0,58	0,42
Gorontalo	0,32	0,28	0,21	0,44	0,31
Sulawesi Barat	0,20	0,25	0,15	0,31	0,22
Maluku	0,26	0,26	0,27	0,25	0,26
Maluku Utara	0,22	0,15	0,15	0,27	0,20
Papua Barat	0,20	0,14	0,21	0,15	0,19
Papua	0,35	0,22	0,35	0,26	0,31
Indonesia	100,00 25.528.060	100,00 11.453.267	100,00 21.186.330	100,00 15.794.997	100,00 36.981.327

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2006, BPS

**TABEL 1.2 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT PROVINSI,
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
PEBRUARI 2007**

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalan	1,46	1,41	0,96	2,05	1,44
Sumatera Utara	5,61	5,21	5,72	5,19	5,49
Sumatera Barat	1,65	1,54	1,13	2,23	1,62
R i a u	2,44	1,33	1,37	3,01	2,10
J a m b i	1,10	1,16	0,74	1,60	1,12
Sumatera Selatan	2,38	2,26	1,94	2,85	2,34
Bengkulu	0,51	0,64	0,49	0,62	0,55
Lampung	2,60	2,27	1,38	3,92	2,50
Bangka Belitung	0,64	0,41	0,53	0,62	0,57
Kepulauan Riau	0,94	1,37	1,71	0,26	1,07
DKI Jakarta	5,75	6,89	10,92	0,00	6,10
Jawa Barat	20,30	16,19	19,79	18,07	19,03
Jawa Tengah	15,67	18,46	15,11	18,34	16,53
D.I. Yogyakarta	1,96	2,44	2,57	1,52	2,10
Jawa Timur	17,51	20,07	16,67	20,37	18,30
Banten	4,66	4,30	5,52	3,32	4,55
B a l i	1,91	2,31	2,28	1,73	2,04
Nusa Tenggara Barat	1,35	2,02	1,27	1,93	1,56
Nusa Tenggara Timur	0,62	0,55	0,49	0,75	0,60
Kalimantan Barat	1,58	1,21	1,17	1,85	1,47
Kalimantan Tengah	0,65	0,65	0,49	0,86	0,65
Kalimantan Selatan	1,18	1,00	1,01	1,26	1,12
Kalimantan Timur	1,59	1,00	1,67	1,07	1,41
Sulawesi Utara	0,96	0,90	0,84	1,08	0,94
Sulawesi Tengah	0,64	0,72	0,47	0,91	0,66
Sulawesi Selatan	2,15	1,96	2,06	2,13	2,09
Sulawesi Tenggara	0,51	0,43	0,32	0,69	0,48
Gorontalo	0,30	0,33	0,24	0,39	0,31
Sulawesi Barat	0,18	0,20	0,09	0,32	0,19
Maluku	0,27	0,20	0,27	0,23	0,25
Maluku Utara	0,18	0,18	0,17	0,20	0,18
Papua Barat	0,27	0,16	0,23	0,24	0,23
Papua	0,48	0,24	0,40	0,42	0,41
Indonesia	100,00 25.850.541	100,00 11.564.044	100,00 20.895.371	100,00 16.519.214	100,00 37.414.585

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Pebruari 2007, BPS

**TABEL 1.3 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT PROVINSI,
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
AGUSTUS 2007**

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalar	1,47	1,32	0,93	2,01	1,42
Sumatera Utara	5,46	5,06	5,44	5,22	5,34
Sumatera Barat	1,63	1,75	1,31	2,10	1,67
R i a u	2,29	1,68	1,54	2,76	2,10
J a m b i	1,01	0,95	0,71	1,33	0,99
Sumatera Selatan	2,45	2,85	2,12	3,13	2,58
Bengkulu	0,55	0,55	0,49	0,62	0,55
Lampung	2,83	2,09	1,57	3,82	2,60
Bangka Belitung	0,56	0,42	0,52	0,52	0,52
Kepulauan Riau	0,80	1,05	1,42	0,22	0,88
DKI Jakarta	5,78	7,41	11,52	0,00	6,29
Jawa Barat	20,06	16,78	19,59	18,35	19,03
Jawa Tengah	15,62	17,73	14,57	18,33	16,28
D.I. Yogyakarta	1,91	2,28	2,51	1,44	2,03
Jawa Timur	17,69	18,86	16,56	19,85	18,05
Banten	4,22	4,43	5,14	3,26	4,29
B a l i	1,92	2,40	2,35	1,73	2,07
Nusa Tenggara Barat	1,42	2,13	1,37	1,98	1,64
Nusa Tenggara Timur	0,79	0,79	0,58	1,03	0,79
Kalimantan Barat	1,46	1,08	1,13	1,60	1,34
Kalimantan Tengah	0,78	0,61	0,57	0,92	0,73
Kalimantan Selatan	1,32	1,33	1,26	1,41	1,33
Kalimantan Timur	1,52	0,97	1,58	1,07	1,35
Sulawesi Utara	0,96	0,88	0,83	1,07	0,94
Sulawesi Tengah	0,79	0,81	0,54	1,11	0,80
Sulawesi Selatan	2,27	1,88	2,04	2,28	2,15
Sulawesi Tenggara	0,56	0,42	0,38	0,69	0,52
Gorontalo	0,36	0,33	0,22	0,51	0,35
Sulawesi Barat	0,22	0,24	0,11	0,37	0,23
Maluku	0,32	0,26	0,29	0,32	0,30
Maluku Utara	0,27	0,21	0,21	0,31	0,25
Papua Barat	0,26	0,13	0,21	0,24	0,22
Papua	0,44	0,34	0,39	0,44	0,41
Indonesia	100,00 26.392.531	100,00 12.026.031	100,00 20.973.695	100,00 17.444.867	100,00 38.418.562

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2007, BPS

**TABEL 1.4 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT GOLONGAN UMUR,
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
AGUSTUS 2006**

Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15 - 19	4,66	8,25	5,17	6,57	5,77
20 - 24	13,31	19,31	16,05	13,99	15,17
25 - 29	15,86	17,99	17,29	15,49	16,52
30 - 34	15,89	13,55	15,59	14,60	15,17
35 - 39	14,34	12,05	13,57	13,71	13,63
40 - 44	11,96	10,27	11,42	11,45	11,44
45 - 49	9,99	7,55	9,25	9,20	9,23
50 - 54	6,83	5,14	6,37	6,22	6,30
55 - 59	3,95	2,52	2,82	4,42	3,51
60 +	3,22	3,37	2,45	4,36	3,26
Jumlah	100,00 25.528.060	100,00 11.453.267	100,00 21.186.330	100,00 15.794.997	100,00 36.981.327

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2006, BPS

**TABEL 1.5 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT GOLONGAN UMUR,
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
PEBRUARI 2007**

Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15 - 19	5,67	8,38	5,63	7,63	6,51
20 - 24	15,00	19,34	17,56	14,80	16,34
25 - 29	15,79	17,31	17,50	14,69	16,26
30 - 34	15,41	13,36	15,06	14,42	14,77
35 - 39	13,80	12,46	13,53	13,20	13,38
40 - 44	12,02	10,00	11,08	11,80	11,40
45 - 49	9,26	8,12	8,65	9,24	8,91
50 - 54	6,29	4,97	5,69	6,13	5,88
55 - 59	3,68	2,97	2,91	4,16	3,46
60 +	3,07	3,08	2,40	3,93	3,07
Jumlah	100,00 25.850.541	100,00 11.564.044	100,00 20.895.371	100,00 16.519.214	100,00 37.414.585

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Pebruari 2007, BPS

**TABEL 1.6 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT GOLONGAN UMUR,
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
AGUSTUS 2007**

Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15 - 19	5,38	8,23	5,63	7,04	6,27
20 - 24	13,94	18,22	16,29	14,06	15,28
25 - 29	15,54	16,67	16,85	14,74	15,89
30 - 34	14,73	12,68	14,28	13,84	14,08
35 - 39	13,90	12,41	13,41	13,46	13,43
40 - 44	12,42	11,39	11,94	12,29	12,10
45 - 49	10,07	8,54	9,59	9,59	9,59
50 - 54	6,98	5,52	6,46	6,60	6,53
55 - 59	3,93	3,01	3,13	4,25	3,64
60 +	3,12	3,33	2,41	4,12	3,19
Jumlah	100,00 26.392.531	100,00 12.026.031	100,00 20.973.695	100,00 17.444.867	100,00 38.418.562

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2007, BPS

**TABEL 1.7 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI
YANG DITAMATKAN, JENIS KELAMIN DAN DAERAH
AGUSTUS 2006**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/Belum Pernah Sekolal	1,84	4,31	1,26	4,40	2,60
Tidak/Belum Tamat SD	7,22	8,70	4,48	11,96	7,68
Sekolah Dasar	28,15	24,64	18,29	38,82	27,06
S M T P Umum	18,36	14,54	16,61	17,95	17,18
S M T P Kejuruan	1,30	1,02	1,18	1,26	1,22
SMTA Umum	20,30	17,63	25,65	11,19	19,47
SMTA Kejuruan	11,74	10,30	14,78	6,62	11,29
Akademi/Diploma I, II	1,87	4,74	2,52	3,08	2,76
Akademi/Diploma III	2,34	4,61	4,27	1,40	3,04
Universitas	6,89	9,51	10,96	3,33	7,70
Jumlah	100,00 25.528.060	100,00 11.453.267	100,00 21.186.330	100,00 15.794.997	100,00 36.981.327

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2006, BPS

**TABEL 1.8 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI
YANG DITAMATKAN, JENIS KELAMIN DAN DAERAH
PEBRUARI 2007**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/Belum Pernah Sekolal	7,04	9,16	4,42	11,83	7,69
Tidak/Belum Tamat SD	30,32	27,42	21,02	40,06	29,42
Sekolah Dasar	19,61	16,28	18,38	18,84	18,58
S M T P Umum	1,51	1,08	1,29	1,48	1,38
S M T P Kejuruan	19,36	16,27	24,51	10,69	18,41
SMTA Umum	10,39	8,65	13,13	5,71	9,86
SMTA Kejuruan	1,53	4,33	2,31	2,50	2,40
Akademi/Diploma I, II	1,97	3,68	3,53	1,19	2,50
Akademi/Diploma III	6,55	8,39	10,26	3,15	7,12
Universitas	1,71	4,75	1,14	4,55	2,65
Jumlah	100,00 25.850.541	100,00 11.564.044	100,00 20.895.371	100,00 16.519.214	100,00 37.414.585

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Pebruari 2007, BPS

**TABEL 1.9 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI
YANG DITAMATKAN, JENIS KELAMIN DAN DAERAH
AGUSTUS 2007**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,79	4,42	1,31	4,18	2,61
Tidak/Belum Tamat SD	8,05	9,36	4,87	12,77	8,46
Sekolah Dasar	31,77	26,87	21,81	40,37	30,24
S M T P Umum	19,57	15,48	17,80	18,87	18,29
SMTA Umum	17,65	15,37	22,38	10,40	16,94
SMTA Kejuruan	9,92	8,76	13,02	5,39	9,56
Akademi/Diploma I, II, III	3,86	9,20	6,63	4,21	5,53
Universitas	7,39	10,55	12,18	3,82	8,38
Jumlah	100,00 26.392.531	100,00 12.026.031	100,00 20.973.695	100,00 17.444.867	100,00 38.418.562

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2007, BPS

**TABEL 1.10 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA,
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
AGUSTUS 2006**

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan.	21,67	20,36	6,77	40,70	21,27
Pertambangan dan Penggalian	1,87	0,28	1,01	1,87	1,38
Industri Pengolahan	19,10	24,19	24,92	14,98	20,68
Listrik, Gas dan Air	0,71	0,18	0,71	0,32	0,55
Bangunan	15,00	0,85	9,34	12,33	10,62
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	10,72	13,32	16,35	5,05	11,53
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	7,23	1,57	6,18	4,53	5,47
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	3,15	3,05	4,57	1,18	3,12
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	20,55	36,20	30,14	19,03	25,40
Jumlah	100,00 25.528.060	100,00 11.453.267	100,00 21.186.330	100,00 15.794.997	100,00 36.981.327

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2006, BPS

**TABEL 1.11 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA,
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
PEBRUARI 2007**

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan.	22,37	24,49	7,18	43,09	23,03
Pertambangan dan Penggalian	1,99	0,33	1,12	1,93	1,48
Industri Pengolahan	19,77	25,31	25,99	15,74	21,47
Listrik, Gas dan Air	0,77	0,11	0,77	0,31	0,57
Bangunan	13,27	0,38	8,60	10,15	9,28
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	11,59	11,73	16,33	5,69	11,63
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	8,26	1,44	7,30	4,70	6,15
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	2,72	2,86	4,19	0,97	2,77
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	19,26	33,35	28,51	17,43	23,62
Jumlah	100,00 25.850.541	100,00 11.574.044	100,00 20.895.371	100,00 16.519.214	100,00 37.414.585

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Pebruari 2007, BPS

**TABEL 1.12 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA,
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
AGUSTUS 2007**

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan.	21,10	22,63	6,41	39,82	21,58
Pertambangan dan Penggalian	2,26	0,41	1,21	2,25	1,68
Industri Pengolahan	18,37	24,87	24,52	15,46	20,40
Listrik, Gas dan Air	0,51	0,17	0,48	0,31	0,40
Bangunan	16,57	0,95	10,26	13,39	11,68
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	10,11	13,11	15,94	5,16	11,05
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	7,48	1,60	6,70	4,37	5,64
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	3,18	2,95	4,75	1,13	3,11
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	20,42	33,31	29,73	18,11	24,45
Jumlah	100,00 26.392.531	100,00 12.026.031	100,00 20.973.695	100,00 17.444.867	100,00 38.418.562

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2007, BPS

**TABEL 1.13 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT UPAH/GAJI SEBULAN,
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
AGUSTUS 2006**

Upah/Gaji Sebulan	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
< 200 000	4,63	15,17	3,87	13,29	7,89
200 000 - 399 999	15,65	25,21	12,98	26,16	18,61
400 000 - 599 999	18,04	15,61	15,19	20,11	17,29
600 000 - 799 999	19,86	13,31	18,35	17,14	17,83
800.000 - 999 999	12,33	8,62	13,68	7,83	11,18
1 000 000 - 1 499 999	13,57	10,71	16,22	7,93	12,68
1 500 000 - 1 999 999	9,09	7,38	11,00	5,28	8,56
2 000 000 +	6,84	4,00	8,71	2,27	5,96
Jumlah	100,00 25.528.060	100,00 11.453.267	100,00 21.186.330	100,00 15.794.997	100,00 36.981.327

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2006, BPS

**TABEL 1.14 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT UPAH/GAJI SEBULAN,
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
PEBRUARI 2007**

Upah/Gaji Sebulan	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
< 200 000	5,13	17,01	4,54	14,19	8,80
200 000 - 399 999	16,01	23,48	13,10	24,91	18,32
400 000 - 599 999	17,36	16,44	15,73	18,78	17,07
600 000 - 799 999	17,91	12,37	17,37	14,72	16,20
800.000 - 999 999	13,14	9,17	14,15	9,09	11,91
1 000 000 - 1 499 999	14,00	9,67	14,95	9,78	12,66
1 500 000 - 1 999 999	8,02	6,90	9,72	5,08	7,67
2 000 000 +	8,43	4,97	10,45	3,45	7,36
Jumlah	100,00 25.850.541	100,00 11.564.044	100,00 20.895.371	100,00 16.519.214	100,00 37.414.585

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Pebruari 2007, BPS

**TABEL 1.15 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT UPAH/GAJI SEBULAN,
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
AGUSTUS 2007**

Upah/Gaji Sebulan	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
< 200 000	4,61	13,85	4,17	11,51	7,50
200 000 - 399 999	16,15	27,30	13,62	26,88	19,64
400 000 - 599 999	16,94	15,40	14,80	18,44	16,46
600 000 - 799 999	18,17	12,09	16,24	16,30	16,27
800.000 - 999 999	12,64	8,08	13,45	8,52	11,21
1 000 000 - 1 499 999	13,65	9,33	15,30	8,69	12,30
1 500 000 - 1 999 999	8,13	7,76	10,33	5,23	8,01
2 000 000 +	9,71	6,18	12,08	4,42	8,60
Jumlah	100,00 26.392.531	100,00 12.026.031	100,00 20.973.695	100,00 17.444.867	100,00 38.418.562

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2007, BPS

**TABEL 1.16 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT JENIS PEKERJAAN UTAMA
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
AGUSTUS 2006**

Jenis Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Profesional, teknis dan yang sejenis	6,77	16,47	10,17	9,24	9,78
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	0,96	0,66	1,35	0,20	0,86
Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	11,22	13,47	16,68	5,52	11,91
Tenaga Usaha Penjualan	6,41	10,06	10,48	3,60	7,54
Tenaga Usaha Jasa	7,69	15,58	13,48	5,66	10,14
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	20,77	19,89	6,44	39,35	20,50
Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan dan Pekerja Kasar	44,33	23,73	39,58	35,76	37,95
Lainnya	1,85	0,15	1,82	0,66	1,33
Jumlah	100,00 25.528.060	100,00 11.453.267	100,00 21.186.330	100,00 15.794.997	100,00 36.981.327

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2006, BPS

**TABEL 1.17 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT JENIS PEKERJAAN UTAMA
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
PEBRUARI 2007**

Jenis Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Profesional, teknis dan yang sejei	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksan	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71
Tenaga Usaha Penjualan	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Tenaga Usaha Jasa	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	21,45	21,45	21,45	21,45	21,45
Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan dan Pekerja Kasar	43,67	43,67	43,67	43,67	43,67
Lainnya	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Jumlah	100,00 25.850.541	100,00 11.564.044	100,00 20.895.371	100,00 16.519.214	100,00 37.414.585

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Pebruari 2007, BPS

**TABEL 1.18 : PERSENTASE PEKERJA/KARYAWAN MENURUT JENIS PEKERJAAN UTAMA
JENIS KELAMIN DAN DAERAH
AGUSTUS 2007**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Profesional, teknis dan yang sejei	8,34	17,57	12,75	9,40	11,23
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksan	1,48	0,47	1,49	0,77	1,16
Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	9,12	12,30	14,69	4,61	10,12
Tenaga Usaha Penjualan	6,26	9,05	10,11	3,55	7,13
Tenaga Usaha Jasa	6,59	11,75	11,38	4,40	8,21
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	20,27	22,31	6,06	38,76	20,91
Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan dan Pekerja Kasar	46,17	26,36	41,71	37,87	39,97
Lainnya	1,78	0,19	1,82	0,63	1,28
Jumlah	100,00 26.392.531	100,00 12.026.031	100,00 20.973.695	100,00 17.444.867	100,00 38.418.562

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2007, BPS

**TABEL 1.19 : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT
LOKASI PENYEBARAN (PROVINSI)
TAHUN 2005 - 2007**

Provinsi	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	110.292	119.586	136.088
Sumatera Utara	211.289	212.362	230.001
Sumatera Barat	116.348	118.710	129.344
R i a u	73.589	74.714	85.721
J a m b i	62.330	62.851	69.318
Sumatera Selatan	109.022	109.677	121.504
Bengkulu	45.356	48.176	51.096
Lampung	104.589	103.689	112.077
Bangka Belitung	18.898	20.603	22.512
Kepulauan Riau	19.286	20.666	25.448
DKI Jakarta	274.822	273.093	278.820
Jawa Barat	417.720	404.757	444.735
Jawa Tengah	461.252	444.496	473.654
D.I. Yogyakarta	92.223	89.707	92.077
Jawa Timur	470.827	449.479	490.420
Banten	76.617	75.926	85.717
B a l i	83.554	85.143	89.291
Nusa Tenggara Barat	73.099	73.883	82.939
Nusa Tenggara Timur	94.086	94.351	105.647
Kalimantan Barat	76.302	77.796	82.410
Kalimantan Tengah	56.058	57.842	66.154
Kalimantan Selatan	74.974	76.593	85.893
Kalimantan Timur	68.622	70.670	80.048
Sulawesi Utara	66.928	68.208	71.795
Sulawesi Tengah	61.760	62.162	71.608
Sulawesi Selatan	169.265	166.627	185.951
Sulawesi Tenggara	56.872	58.806	66.546
Gorontalo	21.210	22.374	26.659
Sulawesi Barat	18.504	19.589	23.468
Maluku	46.115	47.062	53.050
Maluku Utara	24.081	26.852	30.157
Papua Barat	24.220	25.398	27.910
Papua	60.365	62.433	68.268
Luar Negeri	1.020	950	875
Indonesia	3.741.495	3.725.231	4.067.201

Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN)

**TABEL 1.20 : PERSENTASE PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
MENURUT TINGKAT KEPANGKATAN
TAHUN 2005 - 2007**

Tingkat Kepangkatan	2.005	%	2.006	%	2.007	%
(1)	(2)		(3)		(4)	
I/A (Juru Muda)	2.137	0,06	2.047	0,05	17.731	0,44
I/B (Juru Muda Tingkat I)	7.057	0,19	6.080	0,16	4.613	0,11
I/C (Juru)	22.779	0,61	21.573	0,58	37.687	0,93
I/D (Juru Tingkat I)	39.529	1,06	35.156	0,94	27.159	0,67
II/A (Pengatur Muda)	270.782	7,24	278.220	7,47	449.319	11,05
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	189.531	5,07	187.181	5,02	199.682	4,91
II/C (Pengatur)	243.222	6,50	244.765	6,57	257.648	6,33
II/D (Pengatur Tingkat I)	247.994	6,63	234.363	6,29	205.346	5,05
III/A (Penata Muda)	536.882	14,35	552.914	14,84	570.544	14,03
III/B (Penata Muda Tingkat I)	544.878	14,56	523.569	14,05	520.817	12,81
III/C (Penata)	532.563	14,23	493.145	13,24	426.047	10,48
III/D (Penata Tingkat I)	526.152	14,06	542.956	14,58	573.796	14,11
IV/A (Pembina)	521.456	13,94	539.732	14,49	697.556	17,15
IV/B (Pembina Tingkat I)	44.489	1,19	42.628	1,14	61.374	1,51
IV/C (Pembina Utama Muda)	8.169	0,22	14.687	0,39	12.548	0,31
IV/D (Pembina Utama Madya)	2.914	0,08	4.605	0,12	3.893	0,10
IV/E (Pembina Utama)	961	0,03	1.610	0,04	1.441	0,04
Non PGPS	- -		- -		- -	
Jumlah	3.741.495	100,00	3.725.231	100,00	4.067.201	100,00

Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN)

**TABEL 1.21 : PERSENTASE PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2005 - 2007**

Tingkat Pendidikan	2005	%	2006	%	2007	%
(1)	(2)		(3)		(4)	
Sampai dengan Sekolah Dasar	114.260	3,05	100.450	2,70	108.966	2,68
S M T P	121.345	3,24	112.883	3,03	128.485	3,16
S M T A Umum	1.374.175	36,73	1.338.371	35,93	1.520.937	37,40
Diploma I/II/ Akta I/II	672.812	17,98	674.288	18,10	713.725	17,55
Akademi/Diploma III/ Akta III	300.575	8,03	309.735	8,31	338.772	8,33
Tingkat Sarjana (D IV / S1 / S2 / S3)	1.158.328	30,96	1.189.504	31,93	1.256.316	30,89
Jumlah	3.741.495	100,00	3.725.231	100,00	4.067.201	100,00

Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN)

**TABEL 2.1 : RATA-RATA UPAH/GAJI/PENDAPATAN BERSIH PEKERJA
SELAMA SEBULAN MENURUT PROVINSI DAN
JENIS KELAMIN, AGUSTUS 2006
(RUPIAH)**

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	1.105.076	953.759	1.057.422
Sumatera Utara	984.147	747.065	913.571
Sumatera Barat	875.014	853.479	867.315
R i a u	1.163.452	856.023	1.095.631
J a m b i	911.995	715.130	855.395
Sumatera Selatan	933.546	693.164	852.681
Bengkulu	935.300	787.527	895.215
Lampung	623.375	571.243	610.723
Bangka Belitung	986.378	633.806	914.981
Kepulauan Riau	1.377.602	1.006.507	1.248.120
DKI Jakarta	1.563.970	1.210.867	1.430.680
Jawa Barat	876.970	713.169	831.554
Jawa Tengah	675.377	447.821	600.675
D.I. Yogyakarta	921.483	702.475	844.517
Jawa Timur	716.449	527.101	656.216
Banten	1.011.670	816.344	954.286
B a l i	1.121.902	726.670	975.388
Nusa Tenggara Barat	708.012	379.817	575.986
Nusa Tenggara Timur	971.070	946.947	962.641
Kalimantan Barat	1.056.052	825.310	993.629
Kalimantan Tengah	920.522	763.138	873.313
Kalimantan Selatan	960.229	706.891	884.016
Kalimantan Timur	1.565.439	998.247	1.444.778
Sulawesi Utara	939.399	1.082.076	976.093
Sulawesi Tengah	914.045	858.403	892.355
Sulawesi Selatan	990.004	750.592	914.131
Sulawesi Tenggara	885.235	740.434	851.677
Gorontalo	622.145	743.626	656.315
Sulawesi Barat	894.695	730.054	836.354
Maluku	1.137.714	1.072.742	1.117.512
Maluku Utara	940.478	912.538	933.967
Papua Barat	1.540.529	1.167.763	1.451.406
Papua	1.532.824	1.078.759	1.431.353
Indonesia	905.503	693.987	839.996

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2006, BPS

**TABEL 2.2 : RATA-RATA UPAH/GAJI/PENDAPATAN BERSIH PEKERJA
SELAMA SEBULAN MENURUT PROVINSI DAN
JENIS KELAMIN, PEBRUARI 2007
(RUPIAH)**

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	1.189.441	958.300	1.119.717
Sumatera Utara	1.003.439	759.633	931.854
Sumatera Barat	935.400	860.781	913.463
R i a u	1.167.437	891.333	1.113.345
J a m b i	922.061	732.500	861.567
Sumatera Selatan	964.335	682.990	880.357
Bengkulu	936.987	881.901	917.116
Lampung	713.439	576.497	674.986
Bangka Belitung	1.008.460	694.606	937.695
Kepulauan Riau	1.596.929	1.335.931	1.493.593
DKI Jakarta	1.583.929	1.261.821	1.471.537
Jawa Barat	932.773	728.692	879.120
Jawa Tengah	726.817	500.332	648.676
D.I. Yogyakarta	948.660	768.590	884.264
Jawa Timur	755.324	544.104	683.734
Banten	1.142.373	832.925	1.052.020
B a l i	1.126.113	766.986	1.000.343
Nusa Tenggara Barat	776.526	424.904	635.329
Nusa Tenggara Timur	1.018.339	997.572	1.012.420
Kalimantan Barat	1.068.656	844.756	1.011.727
Kalimantan Tengah	1.066.999	843.572	998.169
Kalimantan Selatan	1.003.003	726.913	926.750
Kalimantan Timur	1.801.038	1.033.549	1.632.518
Sulawesi Utara	976.734	1.091.944	1.010.683
Sulawesi Tengah	916.827	864.237	899.244
Sulawesi Selatan	1.013.928	771.922	943.715
Sulawesi Tenggara	930.424	788.933	891.162
Gorontalo	663.070	753.516	693.329
Sulawesi Barat	911.158	770.679	864.801
Maluku	1.144.412	1.126.172	1.139.808
Maluku Utara	1.141.133	918.213	1.074.570
Papua Barat	1.621.324	1.157.508	1.524.580
Papua	1.586.725	1.255.795	1.526.550
Indonesia	958.971	715.414	883.693

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Pebruari 2007, BPS

**TABEL 2.3 : RATA-RATA UPAH/GAJI/PENDAPATAN BERSIH PEKERJA
SELAMA SEBULAN MENURUT PROVINSI DAN
JENIS KELAMIN, AGUSTUS 2007
(RUPIAH)**

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	1.214.760	1.016.160	1.157.017
Sumatera Utara	1.007.558	814.788	950.355
Sumatera Barat	994.502	875.858	955.403
R i a u	1.247.255	912.217	1.163.411
J a m b i	964.281	733.988	895.187
Sumatera Selatan	976.989	734.834	893.155
Bengkulu	1.052.519	888.716	1.000.890
Lampung	735.165	620.134	706.199
Bangka Belitung	1.041.300	748.559	967.347
Kepulauan Riau	1.629.434	1.356.236	1.527.308
DKI Jakarta	1.618.742	1.300.569	1.501.336
Jawa Barat	978.579	746.790	914.622
Jawa Tengah	740.342	503.984	659.761
D.I. Yogyakarta	966.754	771.006	897.771
Jawa Timur	765.218	577.858	703.956
Banten	1.172.790	856.590	1.070.420
B a l i	1.149.968	810.428	1.026.792
Nusa Tenggara Barat	789.483	428.147	642.856
Nusa Tenggara Timur	1.027.062	1.015.855	1.023.557
Kalimantan Barat	1.100.563	903.948	1.051.043
Kalimantan Tengah	1.084.260	926.286	1.042.595
Kalimantan Selatan	1.069.353	751.123	969.181
Kalimantan Timur	1.812.554	1.089.190	1.650.582
Sulawesi Utara	979.819	1.145.127	1.028.496
Sulawesi Tengah	918.639	875.250	904.875
Sulawesi Selatan	1.025.574	777.531	957.762
Sulawesi Tenggara	1.040.693	813.973	983.071
Gorontalo	702.130	787.153	726.720
Sulawesi Barat	958.391	778.611	899.135
Maluku	1.180.226	1.167.901	1.176.873
Maluku Utara	1.158.435	955.259	1.105.759
Papua Barat	1.661.723	1.233.783	1.581.535
Papua	1.700.142	1.350.330	1.610.402
Indonesia	982.450	747.277	908.834

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2007, BPS

**TABEL 2.4 : PERBANDINGAN NILAI RATA-RATA UPAH/GAJI/PENDAPATAN
BERSIH PEKERJA DENGAN KHL DAN UMP SELAMA
SEBULAN MENURUT PROVINSI
AGUSTUS 2006 (RUPIAH)**

Provinsi	Rata-rata upah/gaji/ pendapatan bersih sebulan	KHL	UMP
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	1.057.422	775.000	820.000
Sumatera Utara	913.571	737.794	737.794
Sumatera Barat	867.315	668.678	650.000
R i a u	1.095.631	870.625	637.000
J a m b i	855.395	571.142	563.000
Sumatera Selatan	852.681	853.000	604.000
Bengkulu	895.215	586.000	516.000
Lampung	610.723	589.540	505.000
Bangka Belitung	914.981	714.000	640.000
Kepulauan Riau	1.248.120	991.237	760.000
DKI Jakarta	1.430.680	831.336	819.100
Jawa Barat	831.554	542.621	447.654
Jawa Tengah	600.675	582.128	450.000
D.I. Yogyakarta	844.517	673.518	460.000
Jawa Timur	656.216	580.054	390.000
Banten	954.286	735.126	661.613
B a l i	975.388	742.054	510.000
Nusa Tenggara Barat	575.986	570.000	550.000
Nusa Tenggara Timur	962.641	670.560	550.000
Kalimantan Barat	993.629	605.017	512.000
Kalimantan Tengah	873.313	850.000	634.260
Kalimantan Selatan	884.016	684.319	629.000
Kalimantan Timur	1.444.778	764.756	701.640
Sulawesi Utara	976.093	691.224	713.500
Sulawesi Tengah	892.355	615.000	575.000
Sulawesi Selatan	914.131	672.650	612.000
Sulawesi Tenggara	851.677	573.400	573.400
Gorontalo	656.315	677.162	527.000
Sulawesi Barat	836.354	672.650	612.000
Maluku	1.117.512	1.076.699	575.000
Maluku Utara	933.967	926.286	528.000
Papua Barat	1.451.406	941.099	822.500
Papua	1.431.353	941.099	822.500
Indonesia	839.996	719.834	602.702

Keterangan : KHL = Kebutuhan Hidup Layak

UMP = Upah Minimum Provinsi

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2006, BPS

KHL dan UMP tahun 2006, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**TABEL 2.5 : PERBANDINGAN NILAI RATA-RATA UPAH/GAJI/PENDAPATAN
BERSIH PEKERJA DENGAN KHL DAN UMP SELAMA
SEBULAN MENURUT PROVINSI
PEBRUARI 2007 (RUPIAH)**

Provinsi	Rata-rata upah/gaji/ pendapatan bersih sebulan	KHL	UMP
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	1.119.717	920.000	850.000
Sumatera Utara	931.854	714.337	761.000
Sumatera Barat	913.463	760.000	725.000
R i a u	1.113.345	774.122	710.000
J a m b i	861.567	693.000	658.000
Sumatera Selatan	880.357	753.000	662.000
Bengkulu	917.116	644.000	644.838
Lampung	674.986	554.521	555.000
Bangka Belitung	937.695	830.000	720.000
Kepulauan Riau	1.493.593	943.254	805.000
DKI Jakarta	1.471.537	991.988	900.560
Jawa Barat	879.120	607.425	516.840
Jawa Tengah	648.676	586.220	500.000
D.I. Yogyakarta	884.264	656.976	500.000
Jawa Timur	683.734	458.755	448.500
Banten	1.052.020	764.214	746.500
B a l i	1.000.343	704.000	622.000
Nusa Tenggara Barat	635.329	643.557	645.000
Nusa Tenggara Timur	1.012.420	735.000	600.000
Kalimantan Barat	1.011.727	721.564	560.000
Kalimantan Tengah	998.169	753.098	665.973
Kalimantan Selatan	926.750	768.000	745.000
Kalimantan Timur	1.632.518	882.797	766.500
Sulawesi Utara	1.010.683	705.000	750.000
Sulawesi Tengah	899.244	635.000	615.000
Sulawesi Selatan	943.715	677.333	673.200
Sulawesi Tenggara	891.162	653.250	640.000
Gorontalo	693.329	599.080	560.000
Sulawesi Barat	864.801	886.493	691.464
Maluku	1.139.808	1.091.195	635.000
Maluku Utara	1.074.570	1.475.035	660.000
Papua Barat	1.524.580	941.000	987.000
Papua	1.526.550	941.000	987.000
Indonesia	883.693	766.350	672.480

Keterangan : KHL = Kebutuhan Hidup Layak
UMP = Upah Minimum Provinsi

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Pebruari 2007, BPS
KHL dan UMP tahun 2007, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**TABEL 2.6 : PERBANDINGAN NILAI RATA-RATA UPAH/GAJI/PENDAPATAN
BERSIH PEKERJA DENGAN KHL DAN UMP SELAMA
SEBULAN MENURUT PROVINSI
AGUSTUS 2007 (RUPIAH)**

Provinsi	Rata-rata upah/gaji/ pendapatan bersih sebulan	KHL	UMP
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	1.157.017	920.000	850.000
Sumatera Utara	950.355	714.337	761.000
Sumatera Barat	955.403	760.000	725.000
R i a u	1.163.411	774.122	710.000
J a m b i	895.187	693.000	658.000
Sumatera Selatan	893.155	753.000	662.000
Bengkulu	1.000.890	644.000	644.838
Lampung	706.199	554.521	555.000
Bangka Belitung	967.347	830.000	720.000
Kepulauan Riau	1.527.308	943.254	805.000
DKI Jakarta	1.501.336	991.988	900.560
Jawa Barat	914.622	607.425	516.840
Jawa Tengah	659.761	586.220	500.000
D.I. Yogyakarta	897.771	656.976	500.000
Jawa Timur	703.956	458.755	448.500
Banten	1.070.420	764.214	746.500
B a l i	1.026.792	704.000	622.000
Nusa Tenggara Barat	642.856	643.557	645.000
Nusa Tenggara Timur	1.023.557	735.000	600.000
Kalimantan Barat	1.051.043	721.564	560.000
Kalimantan Tengah	1.042.595	753.098	665.973
Kalimantan Selatan	969.181	768.000	745.000
Kalimantan Timur	1.650.582	882.797	766.500
Sulawesi Utara	1.028.496	705.000	750.000
Sulawesi Tengah	904.875	635.000	615.000
Sulawesi Selatan	957.762	677.333	673.200
Sulawesi Tenggara	983.071	653.250	640.000
Gorontalo	726.720	599.080	560.000
Sulawesi Barat	899.135	886.493	691.464
Maluku	1.176.873	1.091.195	635.000
Maluku Utara	1.105.759	1.475.035	660.000
Papua Barat	1.581.535	941.000	987.000
Papua	1.610.402	941.000	987.000
Indonesia	908.834	766.350	672.480

Keterangan : KHL = Kebutuhan Hidup Layak

UMP = Upah Minimum Provinsi

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2007, BPS

KHL dan UMP tahun 2007, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**TABEL 2.7 : RATA-RATA UPAH/GAJI/PENDAPATAN BERSIH PEKERJA
SELAMA SEBULAN MENURUT GOLONGAN UMUR
TAHUN 2006 - 2007
(RUPIAH)**

Golongan Umur	Agustus 2006	Pebruari 2007	Agustus 2007
(1)	(2)	(3)	(4)
15 - 19	467.023	521.107	493.313
20 - 24	635.641	669.961	676.937
25 - 29	777.390	803.616	819.349
30 - 34	868.344	893.552	920.286
35 - 39	934.503	995.284	1.007.403
40 - 44	1.026.279	1.088.995	1.111.532
45 - 49	1.050.982	1.154.535	1.184.637
50 - 54	1.030.843	1.139.248	1.171.434
55 - 59	921.026	979.979	989.950
60 +	534.296	534.679	588.996
Jumlah	839.996	883.693	908.834

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2006 - 2007, BPS

**TABEL 2.8 : RATA-RATA UPAH/GAJI/PENDAPATAN BERSIH PEKERJA
SELAMA SEBULAN MENURUT PENDIDIKAN
TERTINGGI YANG DITAMATKAN
TAHUN 2006 - 2007
(RUPIAH)**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Agustus 2006	Pebruari 2007	Agustus 2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	321.074	388.962	348.406
Tidak/Belum Tamat SD	411.789	462.407	452.572
Sekolah Dasar	501.948	549.898	588.309
S L T P Umum	650.950	688.218	683.525
S M A Umum	1.012.832	1.103.719	1.084.227
S M A Kejuruan	1.050.386	1.093.177	1.142.235
Akademi/Diploma I, II	1.203.639	1.228.236	1.430.105
Akademi/Diploma III	1.606.337	1.687.522	1.747.388
Universitas	1.903.410	2.193.644	2.128.465
Jumlah	839.996	883.693	908.834

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2006 - 2007, BPS

**TABEL 2.9 : RATA-RATA UPAH/GAJI/PENDAPATAN BERSIH PEKERJA SELAMA
SEBULAN MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA
TAHUN 2006 - 2007
(RUPIAH)**

Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2006	Pebruari 2007	Agustus 2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	419.919	476.052	440.714
Pertambangan dan Penggalian	1.478.391	1.885.608	1.477.670
Industri Pengolahan	806.264	855.001	836.337
Listrik, gas dan air	1.241.511	1.381.369	1.423.137
Bangunan	786.671	871.143	838.031
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan	819.773	835.354	859.092
Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	1.048.624	1.127.876	1.135.124
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	1.594.065	1.761.734	1.630.881
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	1.069.795	1.095.048	1.247.205
Jumlah	839.996	883.693	908.834

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2006 - 2007, BPS

**TABEL 2.10 : RATA-RATA UPAH/GAJI/PENDAPATAN BERSIH PEKERJA SELAMA
SEBULAN MENURUT JENIS PEKERJAAN UTAMA
TAHUN 2006 - 2007
(RUPIAH)**

Jenis Pekerjaan Utama	Agustus 2006	Pebruari 2007	Agustus 2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Profesional,teknis dan yang Sejenis	1.376.442	1.430.688	1.611.510
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	3.039.832	4.405.180	2.787.565
Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	1.344.151	1.395.735	1.374.747
Tenaga Usaha Penjualan	766.811	862.331	853.661
Tenaga Usaha Jasa	629.429	673.614	841.446
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	398.497	452.226	422.047
Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan dan Pekerja kasar	770.061	825.995	778.980
Lainnya	1.775.423	1.919.227	2.100.624
Jumlah	839.996	883.693	908.834

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2006 - 2007 BPS

**TABEL 3.1 : KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) SELAMA
SEBULAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2005 - 2007
(RUPIAH)**

Provinsi	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	619.876	775.000	920.000
Sumatera Utara	547.255	737.794	714.337
Sumatera Barat	501.315	668.678	760.000
Riau	551.498	870.625	774.122
J a m b i	495.242	571.142	693.000
Sumatera Selatan	495.242	853.000	753.000
Bengkulu	480.000	586.000	644.000
Lampung	396.456	589.540	554.521
Bangka Belitung	690.000	714.000	830.000
Kepulauan Riau	552.045	991.237	943.254
DKI Jakarta	759.953	831.336	991.988
Jawa Barat	408.259	542.621	607.425
Jawa Tengah	405.282	582.128	586.220
D.I. Yogyakarta	399.964	673.518	656.976
Jawa Timur	339.227	580.054	458.755
Banten	585.000	735.126	764.214
Bali	447.500	742.054	704.000
Nusa Tenggara Barat	526.040	570.000	643.557
Nusa Tenggara Timur	402.989	670.560	735.000
Kalimantan Barat	482.250	605.017	721.564
Kalimantan Tengah	553.376	850.000	753.098
Kalimantan Selatan	503.775	684.319	768.000
Kalimantan Timur	597.878	764.756	882.797
Sulawesi Utara	522.233	691.224	705.000
Sulawesi Tengah	588.000	615.000	635.000
Sulawesi Selatan	505.000	672.650	677.333
Sulawesi Tenggara	498.600	573.400	653.250
Gorontalo	531.500	677.162	599.080
Sulawesi Barat	-	672.650	886.493
Maluku	602.938	1.076.699	1.091.195
Maluku Utara	674.800	926.286	1.475.035
Papua Barat	-	941.099	941.000
Papua	769.050	941.099	941.000
Indonesia	530.082	719.834	766.350

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**TABEL 3.2: UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) SELAMA
SEBULAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2005 - 2007
(RUPIAH)**

Provinsi	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	620.000	820.000	850.000
Sumatera Utara	600.000	737.794	761.000
Sumatera Barat	540.000	650.000	725.000
Riau	551.500	637.000	710.000
J a m b i	485.000	563.000	658.000
Sumatera Selatan	503.700	604.000	662.000
Bengkulu	430.000	516.000	644.838
Lampung	405.000	505.000	555.000
Bangka Belitung	560.000	640.000	720.000
Kepulauan Riau	557.000	760.000	805.000
DKI Jakarta	711.843	819.100	900.560
Jawa Barat	408.260	447.654	516.840
Jawa Tengah	390.000	450.000	500.000
D.I. Yogyakarta	400.000	460.000	500.000
Jawa Timur	340.000	390.000	448.500
Banten	585.000	661.613	746.500
Bali	447.500	510.000	622.000
Nusa Tenggara Barat	475.000	550.000	645.000
Nusa Tenggara Timur	450.000	550.000	600.000
Kalimantan Barat	445.200	512.000	560.000
Kalimantan Tengah	523.698	634.260	665.973
Kalimantan Selatan	536.300	629.000	745.000
Kalimantan Timur	600.000	701.640	766.500
Sulawesi Utara	600.000	713.500	750.000
Sulawesi Tengah	490.000	575.000	615.000
Sulawesi Selatan	510.000	612.000	673.200
Sulawesi Tenggara	498.600	573.400	640.000
Gorontalo	435.000	527.000	560.000
Sulawesi Barat	-	612.000	691.464
Maluku	500.000	575.000	635.000
Maluku Utara	440.000	528.000	660.000
Papua Barat	-	822.500	987.000
Papua	700.000	822.500	987.000
Indonesia	507.697	602.702	672.480

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**TABEL 3.3 : INDEKS HARGA KONSUMEN (UMUM)
DI 31 IBUKOTA PROVINSI,
TAHUN 2005 - 2007**

Ibukota Provinsi	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Banda Aceh	139,01	172,41	190,86
Medan	129,25	148,78	157,79
Padang	126,12	142,20	154,76
Pekanbaru	130,24	146,03	157,67
Jambi	126,40	143,31	158,19
Palembang	130,90	150,65	162,03
Bengkulu	125,82	144,79	153,84
Bandar Lampung	125,69	145,25	152,69
Pangkal Pinang	129,52	147,69	153,68
Batam	116,80	128,81	135,66
Jakarta	123,77	138,92	147,36
Bandung	127,73	146,29	153,40
Semarang	127,27	143,33	152,36
D.I Yogyakarta	126,50	144,59	156,55
Surabaya	123,74	138,03	146,42
Serang	126,65	142,21	151,37
Denpasar	123,96	135,05	141,21
Mataram	121,56	136,67	146,04
Kupang	128,26	147,23	161,09
Pontianak	122,38	137,47	147,34
Palangka Raya	121,63	136,31	144,93
Banjarmasin	125,20	144,07	156,51
Samarinda	126,00	142,61	152,68
Manado	122,12	138,14	148,02
Palu	128,08	148,20	157,55
Ujung Pandang	120,99	137,84	145,68
Kendari	128,91	149,68	164,40
Gorontalo	121,71	139,77	147,01
Ambon	117,83	133,63	140,25
Ternate	124,31	142,54	151,83
Jayapura	133,11	151,72	167,16
Indonesia	125,09	141,48	150,55

Sumber: Indeks Harga Konsumen di 45 Kota Indonesia (2002=100) 2005 - 2007, BPS

**TABEL 3.4 : INDEKS HARGA KONSUMEN NASIONAL MENURUT
KELOMPOK PENGELUARAN
TAHUN 2005 - 2007**

Kelompok Pengeluaran	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Umum	125,09	141,48	150,55
Bahan Makanan	117,41	134,68	150,08
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	122,81	176,08	144,74
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	131,42	145,38	152,64
Sandang	116,39	126,16	133,13
Kesehatan	116,17	123,92	130,10
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	130,36	141,16	153,37
Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	134,55	166,31	168,17

Sumber: Indeks Harga Konsumen di 45 Kota Indonesia (2002=100) 2005 - 2007, BPS

**TABEL 3.5 : LAJU INFLASI PER TAHUN DI 31 IBUKOTA PROVINSI
TAHUN 2005 - 2007**

Ibukota Provinsi	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Banda Aceh	41,11	9,54	11,00
Medan	22,91	5,97	6,42
Padang	20,47	8,05	6,90
Pekanbaru	17,10	6,32	7,53
Jambi	16,50	10,66	7,42
Palembang	19,92	8,44	8,21
Bengkulu	25,22	6,52	5,00
Bandar Lampung	21,17	6,03	6,58
Pangkal Pinang	17,44	6,42	2,64
Batam	14,79	4,58	4,84
Jakarta	16,06	6,03	6,04
Bandung	19,56	5,33	5,25
Semarang	16,46	6,08	6,75
D.I Yogyakarta	14,98	10,40	7,99
Surabaya	14,12	6,71	6,27
Serang	16,11	7,67	6,31
Denpasar	11,31	4,30	5,91
Mataram	17,72	4,17	8,76
Kupang	15,16	9,72	8,44
Pontianak	14,43	6,32	8,56
Palangka Raya	12,12	7,72	7,96
Banjarmasin	12,94	11,03	7,78
Samarinda	16,64	6,50	9,18
Manado	18,73	5,09	10,13
P a l u	16,33	8,69	8,13
Ujung Pandang	15,20	7,21	5,71
Kendari	21,45	10,57	7,53
Gorontalo	18,56	7,54	7,02
Ambon	16,67	4,80	5,85
Ternate	19,42	5,12	10,43
Jayapura	14,15	9,52	10,35
Indonesia	17,11	6,60	6,59

Sumber: Indeks Harga Konsumen di 45 Kota Indonesia (2002=100) 2005 - 2007, BPS

**TABEL 4.1 : PERSENTASE PENCARI KERJA TERDAFTAR
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2005- 2007**

Provinsi	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,16	0,44	6,86
Sumatera Utara	0,13	0,96	1,25
Sumatera Barat	2,71	2,51	0,97
R i a u	2,67	1,22	2,87
J a m b i	3,25	2,90	4,88
Sumatera Selatan	2,74	2,91	1,98
Bengkulu	0,00	0,00	0,74
Lampung	0,20	0,41	1,99
Bangka Belitung	0,00	0,00	1,09
Kepulauan Riau	2,58	0,23	0,18
DKI Jakarta	0,00	0,00	1,38
Jawa Barat	13,09	22,85	6,25
Jawa Tengah	5,94	7,76	7,57
D.I. Yogyakarta	2,10	3,96	10,26
Jawa Timur	8,64	4,16	9,07
Banten	8,30	10,16	3,13
B a l i	0,08	0,21	0,24
Nusa Tenggara Barat	4,24	0,23	1,63
Nusa Tenggara Timur	9,81	9,99	7,01
Kalimantan Barat	2,06	3,76	3,88
Kalimantan Tengah	1,33	0,58	0,48
Kalimantan Selatan	2,21	5,32	2,17
Kalimantan Timur	8,40	5,45	5,38
Sulawesi Utara	0,19	0,22	0,77
Sulawesi Tengah	0,29	0,35	5,06
Sulawesi Selatan	14,38	9,90	4,17
Sulawesi Tenggara	1,03	2,11	0,81
Gorontalo	0,01	0,03	0,47
Sulawesi Barat	0,00	0,00	0,00
M a l u k u	1,26	0,49	4,37
Maluku Utara	0,03	0,06	0,17
Papua Barat	0,00	0,00	0,00
Papua	2,17	0,85	2,94
Jumlah	100,00 382.706	100,00 696.600	100,00 375.162

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**TABEL 4.2 : PERSENTASE PERMINTAAN TENAGA KERJA
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2005 - 2007**

Provinsi	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,71	1,81	7,38
Sumatera Utara	0,12	0,22	1,13
Sumatera Barat	1,10	0,66	0,86
R i a u	0,27	0,58	1,55
J a m b i	4,58	3,66	3,20
Sumatera Selatan	1,63	2,11	0,73
Bengkulu	0,00	0,00	0,52
Lampung	0,22	0,44	1,13
Bangka Belitung	0,00	0,00	0,80
Kepulauan Riau	0,82	1,89	0,20
DKI Jakarta	0,00	0,00	1,50
Jawa Barat	14,21	13,62	6,68
Jawa Tengah	7,03	7,90	7,11
D.I. Yogyakarta	2,36	4,14	7,39
Jawa Timur	6,00	7,17	9,79
Banten	5,54	7,21	3,57
B a l i	0,04	0,11	0,26
Nusa Tenggara Barat	10,56	0,88	1,79
Nusa Tenggara Timur	10,05	16,19	8,02
Kalimantan Barat	4,64	8,68	4,79
Kalimantan Tengah	0,94	1,13	0,56
Kalimantan Selatan	1,15	2,72	2,59
Kalimantan Timur	19,58	13,67	6,62
Sulawesi Utara	0,31	0,35	0,83
Sulawesi Tengah	0,33	0,38	5,92
Sulawesi Selatan	2,90	3,93	5,15
Sulawesi Tenggara	3,80	0,24	0,67
Gorontalo	0,00	0,00	0,20
Sulawesi Barat	0,00	0,00	0,00
M a l u k u	0,48	0,27	5,34
Maluku Utara	0,00	0,00	0,21
Papua Barat	0,00	0,00	0,00
Papua Barat	0,00	0,04	3,51
Papua	0,63	0,00	0,00
Jumlah	100,00 168.394	100,00 201.415	100,00 300.402

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**TABEL 4.3 : PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2005 - 2007**

Provinsi	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	1,07	2,39	11,77
Sumatera Utara	0,18	0,75	1,84
Sumatera Barat	1,04	0,75	1,11
R i a u	0,31	0,62	2,07
J a m b i	2,48	0,38	4,94
Sumatera Selatan	4,50	6,56	0,66
Bengkulu	0,00	0,00	0,65
Lampung	0,16	0,23	1,58
Bangka Belitung	0,00	0,00	0,75
Kepulauan Riau	1,07	1,82	0,33
DKI Jakarta	0,00	0,00	2,12
Jawa Barat	10,66	18,80	5,77
Jawa Tengah	7,05	8,19	8,63
D.I. Yogyakarta	0,00	0,00	9,74
Jawa Timur	15,75	15,82	9,36
Banten	5,07	6,79	3,71
B a l i	0,02	0,06	0,10
Nusa Tenggara Barat	6,96	0,34	2,24
Nusa Tenggara Timur	5,00	3,36	6,79
Kalimantan Barat	5,51	6,12	5,84
Kalimantan Tengah	1,41	2,01	0,14
Kalimantan Selatan	1,39	3,88	0,95
Kalimantan Timur	23,11	13,78	9,71
Sulawesi Utara	0,97	0,27	0,21
Sulawesi Tengah	0,90	1,90	3,54
Sulawesi Selatan	3,19	3,59	2,61
Sulawesi Tenggara	1,00	1,25	0,97
Gorontalo	0,00	0,00	0,28
Sulawesi Barat	0,00	0,00	0,00
M a l u k u	0,34	0,28	0,40
Maluku Utara	0,10	0,01	0,22
Papua Barat	0,00	0,00	0,00
Papua	0,75	0,04	0,98
Jumlah	100,00 141.277	100,00 346.739	100,00 175.545

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**TABEL 4.4 : PERSENTASE TENAGA KERJA ASING MENURUT
PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2005 - 2007**

Provinsi	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	1,30	0,03	0,04
Sumatera Utara	4,43	0,73	1,12
Sumatera Barat	0,25	0,06	0,12
R i a u	8,72	2,08	1,26
J a m b i	1,27	0,11	0,07
Sumatera Selatan	1,53	0,09	0,14
Bengkulu	0,11	0,01	0,03
Lampung	0,59	0,08	0,07
Bangka Belitung	0,40	0,00	0,01
Kepulauan Riau	0,00	3,16	9,29
DKI Jakarta	49,82	70,53	63,99
Jawa Barat	8,48	9,64	9,30
Jawa Tengah	1,41	1,25	1,30
D.I. Yogyakarta	0,28	0,19	0,16
Jawa Timur	4,61	2,40	2,42
Banten	5,29	4,14	4,14
B a l i	1,84	2,04	2,77
Nusa Tenggara Barat	0,33	0,47	0,64
Nusa Tenggara Timur	0,18	0,02	0,02
Kalimantan Barat	0,35	0,34	0,31
Kalimantan Tengah	0,18	0,17	0,18
Kalimantan Selatan	0,21	0,07	0,10
Kalimantan Timur	3,43	0,84	0,80
Sulawesi Utara	0,38	0,07	0,11
Sulawesi Tengah	0,06	0,05	0,06
Sulawesi Selatan	0,54	0,15	0,15
Sulawesi Tenggara	0,08	0,04	0,05
Gorontalo	0,01	0,00	0,01
Sulawesi Barat	0,00	0,04	0,00
M a l u k u	0,29	0,09	0,04
Maluku Utara	0,06	0,27	0,24
Papua Barat	1,95	0,01	0,06
Papua	1,62	0,10	0,03
Lainnya	0,00	0,73	0,95
Jumlah	100,00	100,00	100,00
	34.378	70.572	74.875

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**TABEL 4.5 : TENAGA KERJA ASING MENURUT NEGARA ASAL
TAHUN 2005 - 2007**

Negara Asal	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Amerika Serikat	6,02	5,80	6,04
Australia	8,66	7,87	6,98
Belanda	1,48	1,40	1,41
Inggris	5,19	5,70	5,27
Jepang	14,10	13,94	13,77
Jerman Barat	1,93	1,64	1,73
Korea Selatan	7,14	7,83	8,12
Kanada	2,39	2,10	1,89
Malaysia	6,86	7,09	8,23
Perancis	2,49	2,52	2,29
Philipina	6,82	6,54	6,05
Singapura	2,91	3,79	4,96
Taiwan	2,82	2,70	2,49
RRC	13,40	14,21	13,17
Hongkong	0,10	0,35	0,26
India	5,83	6,65	6,85
Selandia Baru	1,71	1,43	1,24
Thailand	2,26	1,88	2,32
Negara Lainnya	7,89	6,57	6,94
Jumlah	100,00 34.378	100,00 70.572	100,00 74.875

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**TABEL 4.6 : PERSENTASE TENAGA KERJA ASING MENURUT
LAPANGAN USAHA, TAHUN 2005 - 2007**

Lapangan Usaha	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	2,01	0,57	1,56
Pertambangan dan Penggalian	18,60	15,28	22,01
Industri Pengolahan	24,94	27,47	22,44
Listrik, Gas dan Air	0,51	1,31	0,89
Bangunan	9,79	9,85	8,95
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan, dan Hotel	18,48	8,01	20,40
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	4,05	5,94	4,76
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	3,19	16,18	15,31
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	17,92	11,49	0,29
Lainnya	0,51	3,91	3,39
Jumlah	100,00 34.378	100,00 70.572	100,00 74.875

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**TABEL 4.7 : PERSENTASE TENAGA KERJA ASING MENURUT JABATAN
TAHUN 2005 - 2007**

Jabatan	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Pimpinan (Direksi+Manajer)	36,36	32,09	25,23
Profesional	54,62	0,79	29,39
Supervisor	7,86	0,79	6,45
Tehnisi/Operator	0,93	1,94	8,51
Lainnya (Consultan+Komisaris)	0,23	64,38	30,42
Jumlah	100,00 34.378	100,00 70.572	100,00 74.875

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi